



# UNIVERSITAS WIRARAJA

## LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088  
e-mail : lppm@wiraraja.ac.id Website : lppm.wiraraja.ac.id

### SURAT PERNYATAAN

Nomor : 059/SP.HCP/LPPM/UNIJA/II/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Anik Anekawati, M.Si  
Jabatan : Kepala LPPM  
Instansi : Universitas Wiraraja

Menyatakan bahwa :

1. Nama : Dr. Mohammad Hidayatullah, M.I.Kom.  
Jabatan : Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Nama : Dr. Ita Rahmania Kusumawati, MA  
Jabatan : Universitas Hasyim Asy'ari Jombang

Telah melakukan cek plagiarisme ke LPPM menggunakan *software turnitin.com* untuk artikel dengan judul "**NEGARA DEMOKRASI MENGHADAPI PANDEMI COVID-19: INDONESIA, AMERIKA SERIKAT DAN KOREA SELATAN**" dan mendapatkan hasil similarity sebesar 23%

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan dengan sebaik-baiknya.

Sumenep, 25 Februari 2022  
Kepala LPPM,

Dr. Anik Anekawati, M.Si.  
NIDN. 0714077402

# Negara Demokrasi Menghadapi Pandemi Covid-19: Indonesia, Amerika Serikat dan Korea Selatan

*by* Mohammad Hidayaturrahman

---

**Submission date:** 22-Feb-2022 01:10PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1768158601

**File name:** 0715017702-2926-Artikel-Plagiasi-21-02-2022.pdf (615.58K)

**Word count:** 20360

**Character count:** 131376



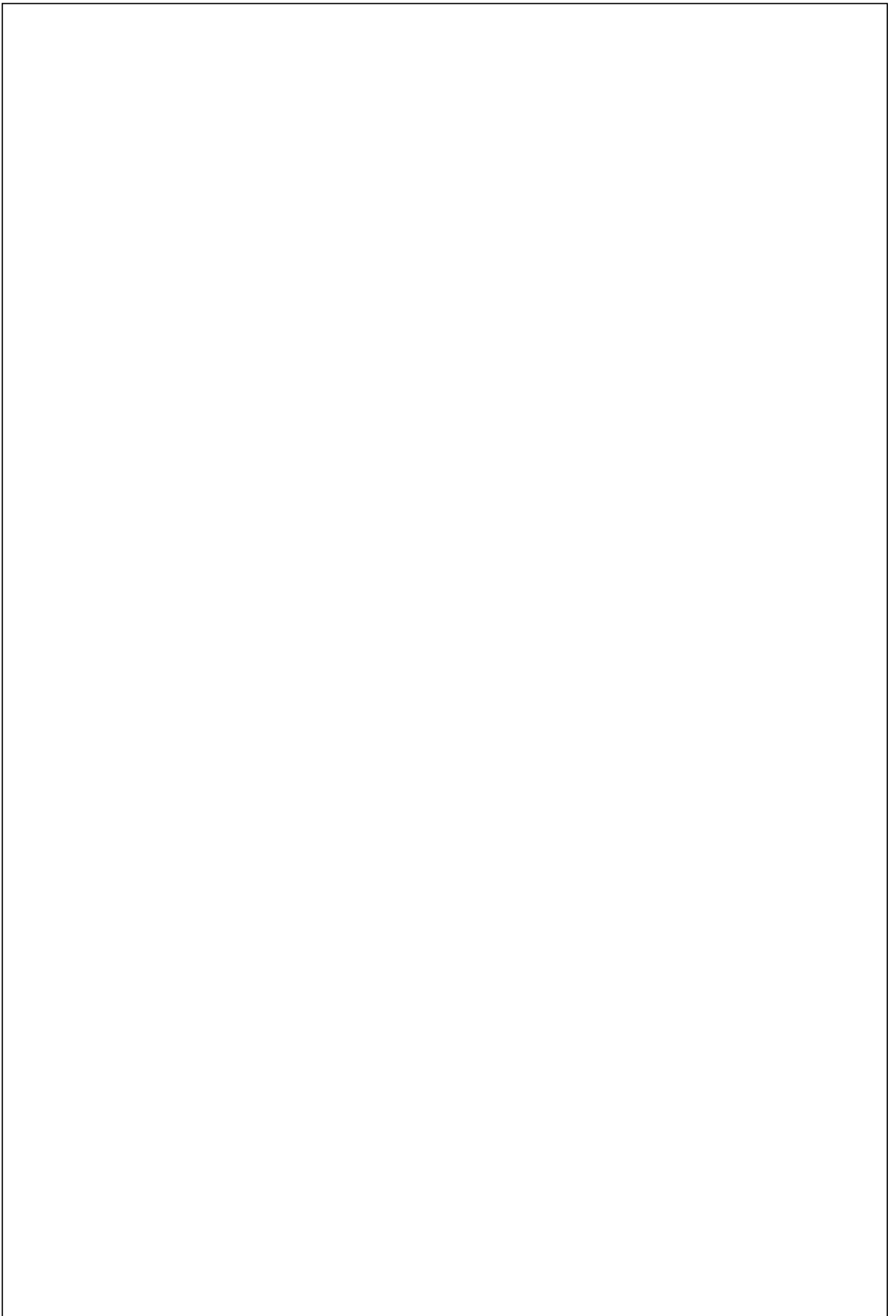
# NEGARA DEMOKRASI

Menghadapi

# Pandemi Covid-19

Indonesia, Amerika Serikat  
dan Korea Selatan

Mohammad Hidayaturrahman  
Ita Rahmania Kusumawati



# **NEGARA DEMOKRASI**

Menghadapi

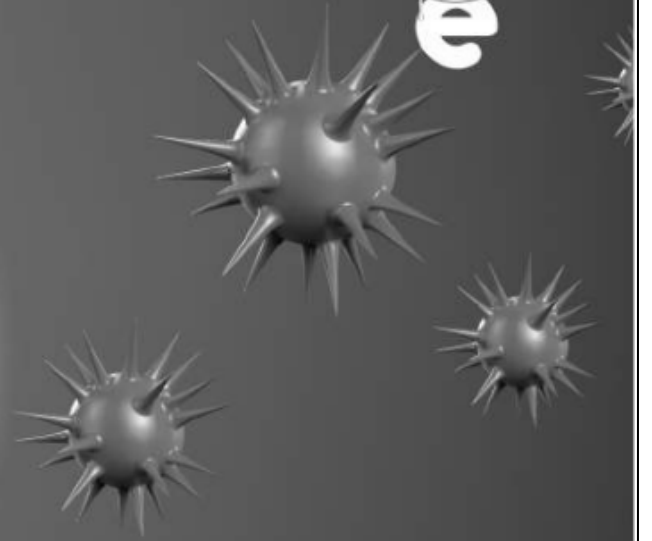
# **Pandemi Covid-19**

Indonesia, Amerika Serikat  
dan Korea Selatan

3

### Sanksi pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 2014 tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf I untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



# NEGARA DEMOKRASI

Menghadapi

# Pandemi Covid-19

Indonesia, Amerika Serikat  
dan Korea Selatan

Mohammad Hidayaturrahman  
Ita Rahmania Kusumawati

**Negara Demokrasi Menghadapi Pandemi Covid-19:**  
Indonesia, Amerika Serikat dan Korea Selatan

85

ISBN: 978-623-6146-80-4

Cetakan pertama, 2021

x + 82 hlm; 15,5 x 23 cm

**Penulis:**

Mohammad Hidayatullah

Ita Rahmania Kusumawati

**Penata Isi:**

M. Faliqul Ishbah

**Penata Sampul:**

Rofiqhi M'umun

3

Diterbitkan oleh:

**Eduitera**

(Anggota IKAPI – No. 211/JTI/2019)

Imprint PT. Literindo Berkah Karya

Jl. Apel No. 28 A Semanding, Sumbersekar,

Dau, Kab. Malang (65151)

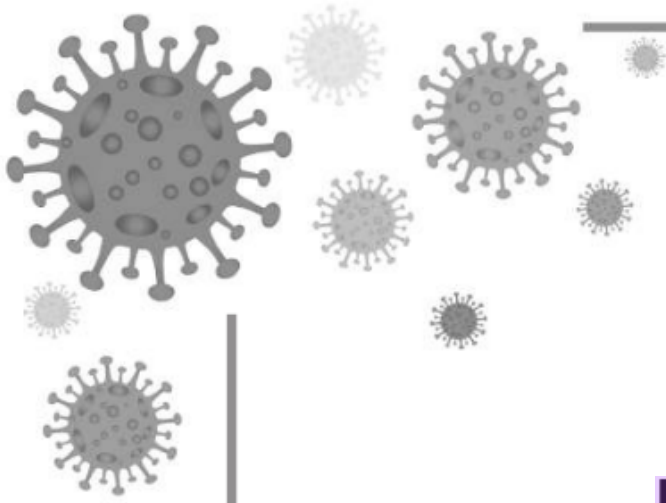
Telp./Fax: (0341) 5033268

Email: [eduliteramalang@gmail.com](mailto:eduliteramalang@gmail.com)

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.





## KATA PENGANTAR

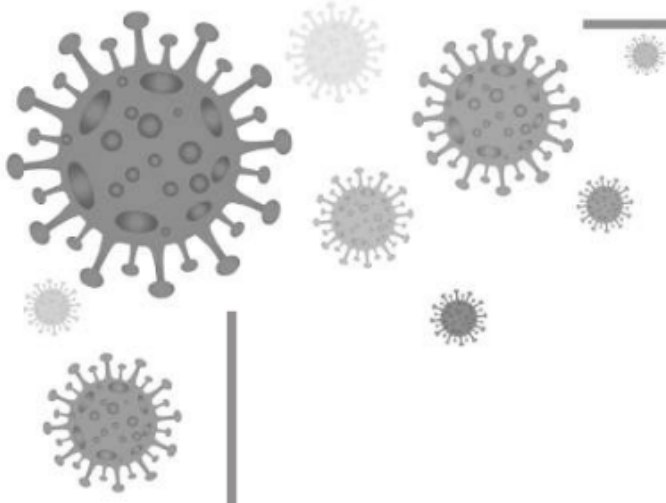
KITA bersyukur kepada Allah SWT, di tengah keterbatasan adanya pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, kita masih diberi kesempatan dan kekuatan serta kesehatan oleh Allah SWT untuk bisa tetap produktif, berkarya membangun budaya literasi membuat penelitian, dan menyusun penelitian menjadi buku, yang saat ini berada di tangan pembaca.

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada tauladan, pembawa terang di tengah gulita, pembawa petunjuk di tengah kesesatan, Nabi Muhammad SAW. Semoga shalawat dan salam juga terlimpah kepada keluarga, sahabat dan pengikut yang setia dengan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sungguh benar pada diri Rasulullah SAW ada tauladan bagi orang-orang yang percaya terhadap adanya kehidupan akhirat. Rasulullah Muhammad SAW telah mengajarkan bagaimana seharusnya manusia menghadapi wabah, namun banyak diabaikan oleh umatnya.

*- Ita Rahmania Kusumawati -*

Diucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya kepada Universitas Wiraraja Madura, dan Center for Indonesian Reform (CIR) atas terbitnya buku ini. Buku ini disusun dari hasil penelitian yang dilakukan selama pandemi berlangsung di Indonesia tahun 2020-2021. Membaca buku ini seperti mengingatkan, ada pelajaran berharga yang diajarkan oleh covid-19 terhadap anak bangsa, bahwa pandemi pernah membuat negara demokrasi harus berjibaku untuk menghadapinya. Hasilnya, ada yang berhasil dengan baik, ada yang kurang berhasil dengan baik. Negara mana yang berhasil, dan negara mana yang kurang berhasil? Simak lengkapnya di dalam buku ini.

Madura, 1 September 2021



# DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
Latar Belakang.....	1
Rumusan Masalah .....	4
Tujuan .....	5
Manfaat.....	5
<b>BAB II</b>	
<b>KAJIAN PUSTAKA</b> .....	7
Pengertian Demokrasi .....	7
Teori Demokrasi.....	8
Demokrasi Menurut John Locke .....	10
Demokrasi Menurut Rousseau.....	11
Demokrasi Menurut Thomas Hobbes.....	12
Demokrasi Menurut Montesquieu .....	13
Demokrasi Menurut Jeremy Bentham .....	14
Demokrasi Menurut Robert Dahl .....	14
Demokrasi Menurut Ibn Rusyd.....	15
Demokrasi Menurut Jurgen Habermas .....	16

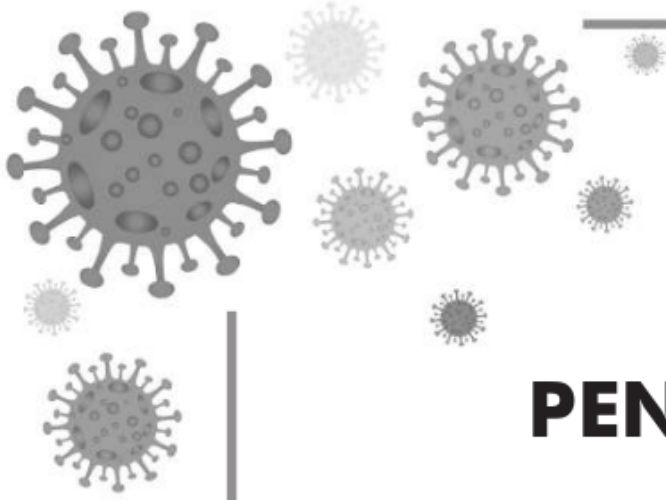
Sejarah Demokrasi .....	17
Negara Demokrasi Indonesia .....	18
Sejarah Demokrasi di Indonesia.....	19
Peluang dan Tantangan Demokrasi di Indonesia.....	20
Negara Demokrasi Amerika Serikat .....	20
Sejarah Demokrasi di Amerika Serikat.....	21
Peluang dan Tantangan Demokrasi di Amerika Serikat .....	22
Negara Demokrasi Korea Selatan.....	23
Sejarah Demokrasi di Korea Selatan.....	24
Peluang dan Tantangan Demokrasi di Korea Selatan.....	25
Pandemi Covid-19 .....	25
Demokrasi di Masa Pandemi Covid-19 .....	26
<b>BAB III</b>	
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	29
Rancangan Penelitian .....	29
Metode Penelitian .....	29
Fokus Penelitian .....	30
Lokasi Penelitian .....	30
Instrumen Penelitian .....	30
Sumber Data .....	30
Teknik Pengumpulan Data.....	31
Teknik Analisis Data .....	31
Keabsahan Data .....	31
Penyajian Data .....	32
<b>BAB IV</b>	
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	35
Sistem Politik .....	36
Sistem Politik di Indonesia .....	36
Sistem Politik di Amerika Serikat .....	37
Sistem Politik di Korea Selatan .....	38

Sejarah Menghadapi Pandemi .....	40
Sejarah Indonesia Menghadapi Pandemi.....	40
Sejarah Amerika Serikat Menghadapi Pandemi .....	41
Sejarah Korea Selatan Menghadapi Pandemi.....	42
Respon Pemerintah .....	43
Respon Pemerintah Indonesia.....	43
Respon Pemerintah Amerika Serikat.....	44
Respon Pemerintah Korea Selatan.....	45
Biaya Melawan Covid-19 .....	46
Biaya Melawan Covid-19 di Indonesia .....	46
Biaya Menghadapi Covid-19 di Amerika Serikat .....	46
Biaya Menghadapi Covid-19 di Korea Selatan .....	47
<b>BAB V</b>	
<b>KESIMPULAN</b> .....	53
Daftar Pustaka.....	55
Riwayat Penulis.....	69

- Ita Rahmania Kusumawati -

x

**1**  
**Negara Demokrasi Menghadapi Pandemi Covid-19**  
Indonesia, Amerika Serikat dan Korea Selatan



# PENDAHULUAN

## LATAR BELAKANG

<sup>12</sup> Covid-19 menjadi pandemi yang melanda hampir seluruh negara di dunia (Dube et al., 2021). Jumlah korban covid-19 terus meningkat dari waktu ke waktu (Szekely et al., 2021). Banyak negara yang berhasil menangani pandemi covid-19, bila diukur dari sedikitnya warga yang terpapar dan jumlah korban meninggal yang minim (AlTakarli, 2020). Namun tidak sedikit negara yang gagal, dilihat dari tingginya warga yang terpapar, dan banyaknya korban meninggal (Alfadewa et al., 2021). Semua negara yang dilanda pandemi covid-19, sedang terus bekerja keras untuk menangani pandemi covid-19 (Duek & Fliss, 2020). <sup>77</sup> Negara-negara yang terpapar covid-19 mengalokasikan sumber daya yang dimiliki, baik anggaran maupun sumber daya manusia untuk keluar dari krisis yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 (Mana et al., 2021).

Di beberapa negara, terutama negara muslim, banyak praktik dan ritual yang rentan menjadi media penyebaran covid-19, mencakup berkumpul di ruang publik dengan jumlah besar, salam berbasis tangan, dan menyentuh benda yang dianggap sakral (World

Health Organization, 2020). Sebuah acara tabligh akbar yang diadakan di masjid Sri Petaling Kuala Lumpur Malaysia pada 28 Februari hingga 1 Maret yang dihadiri oleh lebih dari 16.000 orang dari 26 negara menjadi pusat penyebaran kasus covid-19 (Sebayang, 2020; Yong, 2020). Dua seminar keagamaan yang diselenggarakan di Bogor Jawa Barat menjadi sumber penyebaran covid-19 di Indonesia. Dua seminar tersebut, yaitu Persidangan Sinode Tahunan 2020 yang dilaksanakan oleh Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan Seminar Platform Bisnis Tanpa Riba yang diselenggarakan oleh Masyarakat Tanpa Riba (Adam, 2020).

5 Iran juga tidak luput dari covid-19, yang kemudian mentransmisi ke Afghanistan, Bahrain, Irak, Kuwait, Lebanon, Oman, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab. Transmisi skala global menjadi rawan di negara-negara muslim dengan adanya wisata religi yang ada di negara-negara tersebut (WHO, 2020). Seperti yang terjadi di Arab Saudi, berdasarkan data 2019 ada 7,5 juta orang yang berasal dari 180 negara di seluruh dunia yang melaksanakan ibadah umroh (Al-Tawfiq & Memish, 2019; Vahdat & Gambrell, 2020). Arab Saudi menjadi salah satu negara yang penduduknya terinfeksi dan menjadi pusat transmisi covid-19 dari warga yang positif, yang berasal dari berbagai negara di dunia (Ebrahim & Memish, 2020).

Beberapa negara demokrasi, menghadapi persoalan ganda. Pada satu sisi harus melakukan pencegahan dan penanganan pandemi covid-19, salah satunya dengan menjaga jarak dan menghindari kerumunan (Khan et al., 2021). Namun pada saat yang lain, harus menyelenggarakan pemilihan umum, yang tentu saja mengundang orang banyak, dalam waktu bersamaan untuk datang ke tempat pemungutan suara, seperti yang dialami Amerika Serikat (Norris & Gonzalez, 2020). Kondisi ini menjadi potensi penyebaran covid-19 (Landman & Splendore, 2020). Selain itu, kandidat yang ikut kontestasi pemilihan umum juga melakukan kegiatan kampanye yang mengumpulkan massa dalam jumlah banyak. Mereka datang ke suatu tempat yang sama untuk mengikuti kampanye yang dilakukan oleh kandidat. Begitu pula dengan panitia penyelenggara pemilihan, terlibat dalam pertemuan atau rapat yang melibatkan orang dalam jumlah tidak sedikit (Rusydi & Sulchan, 2020).



Demokrasi memiliki nilai dan semangat kebebasan (Schwelb, 1967). Kebebasan dalam demokrasi adalah nilai inti, selain kesetaraan (Latimer, 2018). Di negara yang menganut sistem demokrasi, setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama (Arnold, 2016). Kebebasannya juga dijamin oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku (Aakvaag, 2018). Warga negara yang hidup di negara demokrasi bebas melakukan apa saja, tanpa merasa takut terhadap pemerintah yang berkuasa (Mauk, 2019). Di negara demokrasi, rakyat memiliki daulat untuk melakukan apa saja, sepanjang tidak melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku (Broderick, 2020). Di negara demokrasi, peraturan yang dibuat juga atas partisipasi dan prakarsa masyarakat (Lejarraga, 2017). Doktrin demokrasi jelas, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Guttry, 2018).

Pada titik ini negara demokrasi menghadapi tantangan yang cukup hebat dalam mengatasi pandemi covid-19 (Sohrabi et al., 2020). Covid-19 sudah menjadi pandemi dunia (Trilla, 2020). Hampir seluruh negara di dunia sudah terpapar, dengan jumlah korban positif mencapai jutaan jiwa, dan jumlah korban meninggal mencapai ratusan ribu (Jung et al., 2020). Dari hari ke hari, jumlah korban terus bertambah (Jordan et al., 2020). Negara satu dengan negara lain silih berganti menempati peringkat tertinggi sebaran covid-19 (Acuto, 2020; Alipio, 2020). Meski terus berupaya mengatasi pandemi covid-19, negara-negara ada yang seperti kewalahan menghadapi pandemi covid-19 (Dalglish, 2020).

Bagaimana tidak, dengan model penyebaran dari manusia ke manusia, covid-19 cepat menginfeksi (Shereen et al., 2020). Tidak hanya korban meninggal, warga yang sakit terus bertambah (Hart, 2020). Hal ini menyebabkan negara-negara di dunia harus mengerahkan segenap sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia (Yee et al., 2020), maupun daya keuangan, untuk bisa mengobati warga yang menjadi korban covid-19 (Asyary & Veruswati, 2020). Pada saat yang sama negara yang mengalami pandemi covid-19 juga menuju krisis keuangan (Hiscott et al., 2019). Akibat sektor ekonomi banyak yang tidak berjalan normal (De Vito & Gómez, 2020), perekonomian melemah (McKibbin & Fernando, 2020), pendapatan negara menjadi berkurang (Zhang et al., 2020). Sementara negara tetap harus membiayai aparat pemerintah

dan wakil rakyat, termasuk membayar pajak negara (Handoyo et al., 2020). Selain itu, negara juga harus memberi bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak covid-19 (McKee & Stuckler, 2020). Termasuk warga miskin (Hevia & Neumeyer, 2020), korban pemutusan hubungan kerja (International Labour Organization, 2020), atau warga lain yang tidak bisa melanjutkan usaha dan aktivitas (Gentilini et al., 2020).

Manusia diminta untuk berada di rumah (Feng et al., 2020), untuk menjaga jarak fisik dengan manusia lain (Bhadoria et al., 2020), dan menjaga aktivitas sosial (Patel et al., 2020), untuk menghindari penyebaran yang lebih luas (Hagerty & Williams, 2020). Memang sebelum vaksin covid-19 ditemukan, hanya ada satu cara yang dilakukan untuk menjaga penyebaran covid-19, yaitu dengan cara menjaga jarak (physical distancing) (Chen et al., 2020). Membatasi interaksi secara fisik antara manusia dengan manusia (Jacob et al., 2020). Membatasi ruang gerak manusia untuk bertemu langsung dengan manusia (Kawashima et al., 2020). Poin ini yang sesungguhnya bertolak belakang dengan demokrasi yang memiliki semangat dan nilai kebebasan (Hodge, 2014). Manusia yang berada di negara demokrasi selama ini bebas melakukan aktivitas apa saja, tanpa ada yang menghalangi (Alexander, 2012). Namun saat ini, kebebasan tersebut dibatasi oleh covid-19 (Jean & Bouchard, 2020). Tantangan besar bagi negara demokrasi yang dilanda pandemi covid-19 (Paital et al., 2020). Warga negara sudah terbiasa dengan kebebasan, namun untuk mengatasi pandemi covid-19, aktivitas dan kebebasan warga harus dibatasi (Acuña-Zegarra et al., 2020). Tentu saja tidak mudah, di negara yang warganya sudah terbiasa bebas, kemudian dibatasi sedemikian rupa, dilarang keluar rumah, dilarang bepergian, dilarang berkumpul-berkumpul di tempat keramaian (Ibarra-Vega, 2020).

## RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam buku monograf ini adalah “bagaimana negara-negara demokrasi menghadapi pandemi covid-19?”

## **TUJUAN**

1. Untuk mengetahui negara-negara demokrasi dalam menghadapi pandemi covid-19.
2. Untuk menganalisis upaya dan strategi yang dilakukan oleh negara-negara demokrasi dalam menghadapi pandemi covid-19.

## **MANFAAT**

1. Bagi kalangan akademi, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan kajian mengenai negara demokrasi di dalam menghadapi dan mencari solusi pada saat terjadi krisis.
2. Bagi pemerintah dan stakeholders terkait, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan, masukan untuk membuat kebijakan pada saat terjadi krisis.
3. Bagi khalayak umum, penelitian ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan, bahwa demokrasi dan kebebasan memiliki tantangan dan peluang dalam mencari solusi dari persoalan yang terjadi.



## KAJIAN PUSTAKA

72

### PENGERTIAN DEMOKRASI

Demokrasi berasal dua kata, bahasa Yunani yaitu “demos” yang artinya rakyat, dan “kratos” yang artinya kekuasaan. Secara bahasa demokrasi berarti kekuasaan oleh rakyat (*power by the people*) (Qoroni & Widiarwati, 2021). Hal tersebut juga disampaikan oleh Abraham Lincoln (1861), mantan Presiden Amerika Serikat. Lincoln menyebut demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat “*from the people by the people for the people*” (Hidayat & Azmi, 2018).

Menurut Joseph A. Schumpeter, demokrasi adalah proses kelembagaan yang dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan melalui keputusan politik, yang diperjuangkan dengan cara kompetisi untuk mendapatkan suara rakyat. Schumpeter menyebut demokrasi lebih dekat kepada kapitalisme, keduanya memiliki hubungan timbal-balik dan hubungan sebab-akibat (Elliott, 1994).

Bagi Lise Storm, pengertian demokrasi yang berkembang saat ini beragam. Mulai dari demokrasi liberal, demokrasi delegatif, demokrasi industri, demokrasi Barat, demokrasi Islam, semi-demokrasi, demokrasi

fasad, dan lainnya. Namun Storm menginginkan supaya demokrasi diberi pengertian yang lebih baru, yaitu “setiap pemerintah yang tidak otoriter itu dapat disebut sebagai demokrasi”. Sehingga ada pemaknaan baru terhadap demokrasi dan demokrasi lebih universal pengertiannya (Storm, 2008). Pengertian ini yang ditawarkan oleh Juan Linz, yang menyebut bahwa demokrasi adalah lawan dari “otokratis, otoriter, despotik, diktator, tirani, totaliter, absolutis, tradisional, monarki, oligarki, plutokratis, aristokrat, dan sultanistik” (Schmitter & Karl, 1991).

## TEORI DEMOKRASI

Ada banyak teori demokrasi yang dikemukakan oleh ahli politik. Teori demokrasi yang dikemukakan di dalam buku ini adalah teori demokrasi menurut Hans Kelsen. Helsen kelahiran Praha, Ibukota Republik Ceko pada tanggal 11 Oktober 1881. Helsen kemudian pindah ke Wina, Ibukota Federal Republik Austria untuk belajar. Pada tahun 1906 ia mendapat gelar doktor di bidang hukum dari Universitas Wina. Meski mendapat gelar doktor hukum, Kelsen punya minat dan konsentrasi terhadap di bidang humanistik. Semangatnya untuk menekuni bidang tersebut yang membuatnya melahirkan banyak karya, terutama karya di bidang politik, sepanjang karir dan hidupnya. Kelsen menjadi guru besar (profesor) tamu di Departemen Ilmu Politik University of California, Berkeley pada tahun 1942. Tiga tahun kemudian, ia menjadi guru besar (profesor) penuh pada tahun 1945, dan menjadi warga negara Amerika Serikat (Ladavac, 1998).

Hans Kelsen banyak menulis karya mengenai teori politik, termasuk demokrasi dan sosialisme. Salah satu tulisan Kelsen yang cukup dikenal adalah idenya tentang kebebasan. Menurut Kelsen, kebebasan merupakan hal paling esensial di dalam demokrasi. Sebab kebebasan merupakan nilai utama yang ada di dalam diri manusia. Saat manusia berada dalam kondisi bebas, maka manusia bebas menentukan apa saja yang akan dilakukan oleh dirinya. Hal ini tidak hanya mencakup bebas dari semua bentuk ikatan yang membuatnya tidak bebas. Namun bebas juga dalam bentuk kebebasan untuk menentukan setiap kehendak. Kelsen secara tidak langsung mengatakan bahwa tidak ada demokrasi

tanpa kebebasan. Dan setiap kebebasan berarti menganjurkan pada kehidupan yang demokratis. Setiap bentuk belenggu terhadap kebebasan adalah bukan demokrasi (Kelsen, 2001).

Menurut pendapat Hans Kelsen, demokrasi tidak semata-mata diukur dari jumlah suara mayoritas yang mengalahkan suara minoritas. Jika yang terjadi mayoritas selalu mengalahkan minoritas, maka akan lahir dominasi absolut. Akomodasi mayoritas dalam demokrasi adalah keterlibatan sebanyak mungkin pihak yang ada di dalam masyarakat untuk menyusun atau membentuk aturan dan tatanan hukum, yang akan dijadikan pedoman bersama dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Ini bagian dari prinsip konstitusional dalam negara demokrasi (Vinx, 2021).

Menurut Kelsen, konstitusi menetapkan berbagai aturan dan ketentuan yang akan menjadi panduan di dalam kehidupan demokrasi. Hal tersebut dilakukan supaya ada ketertiban di dalam menjalankan kebebasan dalam berdemokrasi. Teori demokrasi yang dijelaskan Kelsen meniscayakan adanya hukum yang dibuat oleh semakin banyak orang, untuk mengatur kehidupan orang dalam menjalankan kebebasan dalam demokrasi. Konstitusi yang menjadi legalitas bagi semua pihak untuk menjalankan kebebasan. (Kalyvas, 2006).

Dengan begitu demokrasi adalah demokrasi massa, yaitu demokrasi yang melibatkan sebanyak mungkin orang, semakin banyak yang terlibat semakin demokratis. Bukan demokrasi yang terbatas hanya dikendalikan oleh segelintir orang, atau hanya sebagian orang. Demokrasi yang terbatas pada sebagian kecil orang adalah demokrasi rasis. Pada akhirnya demokrasi seperti itu harus digantikan oleh demokrasi rakyat, yang mengakomodasi aspirasi dan kepentingan rakyat banyak (Kelsen, 1955).

Akomodasi di dalam demokrasi adalah bentuk kompromi yang menyatukan perbedaan. Akomodasi selanjutnya akan menjadi jalan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat, termasuk persoalan yang berkaitan dengan konflik yang terjadi. Pada hakikatnya di antara perbedaan yang ada, tidak sepenuhnya berbeda secara keseluruhan. Namun ada bagian dari perbedaan tersebut yang memiliki persamaan. Persamaan itu yang kemudian diakomodasi di dalam demokrasi (Mersel, 2006).

Kebebasan memunculkan pendapat dan aspirasi dari masyarakat. Masyarakat bebas menyampaikan pendapatnya tanpa merasa terkekang, atau takut terhadap, berbagai tindakan yang mengancam kebebasan. Di dalam negara demokrasi kebebasan berbicara dijamin tidak hanya dalam berbicara di ruang sidang parlemen, namun juga kebebasan berbicara di masa saja, termasuk kebebasan pers untuk menyampaikan pendapat, opini dan berita. Bagi Kelsen, kebebasan menunjukkan manusia otonomi dari semua otoritas. Hal itu merupakan kebebasan esensial dari kehidupan manusia yang diberi kebebasan sejak lahir (Baume, 2009).

Dari teori demokrasi yang ditawarkan oleh Kelsen, kompromi merupakan hal penting untuk melihat apakah sebuah negara menjalankan prinsip demokrasi atau tidak. Sehingga demokrasi tidak semata-mata merupakan kebebasan yang mutlak, namun juga kompromi terhadap kebiasaan, adat istiadat, dan budaya yang ada di suatu masyarakat. Maka demokrasi yang dijalankan oleh suatu negara, tidak secara otomatis dapat dijadikan patokan atau landasan dalam kehidupan demokrasi di negara lain. Setiap negara memiliki perbedaan di dalam menjalankan demokrasi, tergantung kepada kebiasaan yang terjadi pada suatu negara. Banyak varian demokrasi yang ditemukan di berbagai negara di dunia. Hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa demokrasi merupakan proses yang terus mengalami dinamika dan perubahan, sebagai bentuk kompromi antara mayoritas dengan kelompok minoritas di suatu negara atau komunitas yang menjalankan demokrasi (Thalhah, 2009).

### **Demokrasi Menurut John Locke**

John Locke lahir pada tahun 1632 di Somerset, Inggris. Dia lahir dari keluarga besar yang taat beragama. Dibesarkan dalam keluarga yang dapat berpengaruh kepada kehidupan pribadi Locke. Ada latar belakang yang berbeda antara kehidupan keluarga Locke dengan kehidupan Inggris pada masanya. Di dalam keluarga Locke tumbuh di tengah keluarga yang tertib dan taat atau puritan. Kehidupannya terdidik dengan baik, kesehatannya terjamin. Hidupnya penuh dengan kedisiplinan. Namun di luar, kehidupan Inggris mengalami guncangan, tidak hanya guncangan ekonomi, tapi juga guncangan sosial dan politik.



Terjadi revolusi di Inggris yang merubah kehidupan sosial, agama dan intelektual. Pendidikan formal ditempuh Locke di sekolah paling bagus di Inggris pada masa Cromwell, yaitu Westminster School. Namun Locke merasa kurang puas dengan studi yang ditempuhnya di Westminster School, ia pindah ke Oxford pada 1652. Oxford John Locke belajar selama 15 tahun. Pada tahun 1649-1660 kisruh politik terjadi di Inggris, raja yang berkuasa beserta seluruh keluarga dan pendukungnya dibunuh, tanpa proses yang jelas. Monarki dan kekuasaan Gereja Anglikan dihapus (Wijaya, 2014).

Dalam pemikiran politik dan demokrasi Locke memiliki pandangan yang liberal. Hal tersebut dituangkan di dalam tulisannya yang berjudul “The Second Treatise on Government & Essay concerning Human Understanding.” Menurut John Locke<sup>70</sup> kekuasaan tidak bisa dipegang oleh satu orang, seperti kekuasaan berada di tangan satu orang raja. Perlu ada pemisahan kekuasaan di dalam menjalankan pemerintahan. Konsep pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) pertama kali digagas oleh John Locke. Kekuasaan negara dibagi menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan kekuasaan federatif, yang terpisah satu sama lain (Phạm, 2001).

### Demokrasi Menurut Rousseau

Jean-Jacques Rousseau yang lebih dikenal dengan Rousseau<sup>134</sup> lahir di Jenewa, Swiss pada tanggal 28 Juni 1712. Sejak kecil sampai remaja, Rousseau tumbuh sebagai seorang Calvinis Ortodoks, namun ia kemudian menjadi Katolik. Pemikiran politik dan demokrasi Rousseau melihat bahwa manusia ke dunia membawa hak kebebasan atau kemerdekaan, kesamaan dan hak milik. Ketiga hak tersebut merupakan hak alamiah setiap manusia yang lahir. Menurut Rousseau<sup>2</sup>, kebebasan akan terjadi apabila ada kehendak umum. Kebebasan adalah suatu keadaan tidak terdapatnya keinginan manusia untuk menaklukan sesamanya. Manusia merasa bebas dari ketakutan akan kemungkinan terdinya penaklukan atas dirinya baik secara persuasif maupun kekerasan. Manusia bebas yang bersepakat membentuk kekuasaan bersama. Kekuasaan bersama yang disebut sebagai kedaulatan rakyat (Wijaya, 2016).

Menurut Suseno, bagi Rousseau, <sup>2</sup>kehendak umum “adalah basis bagi konstruksi negara. Undang-undang harus merupakan ungkapan kehendak umum. Tidak ada perwakilan rakyat karena kehendak rakyat tidak dapat diwakili. Rakyat sendiri harus berkumpul dan menyatakan kehendaknya melalui perundangan yang diputuskan. Pemerintah yang kemudian melaksanakan keputusan tersebut. Jika rakyat yang memerintah sendiri dan secara langsung maka tidak diperlukan lagi undang-undang dasar atau konstitusi karena yang dikehendaki rakyat adalah hukum. Kehendak umum akan terwujud bila terdapat suatu perjanjian sosial. Pada tahun <sup>2</sup>1762 Rousseau menulis buku “The Social Contract.” Buku tersebut <sup>2</sup>kemudian menuai kecaman terutama dari pejabat. Pemerintah Prancis, Jenewa, dan Prusia mengusirnya (Haliim, 2016).

### <sup>39</sup>Demokrasi Menurut Thomas Hobbes

Thomas Hobbes lahir di Westport (Malmesbury) Wiltshire, Inggris, pada 5 April 1588. Hobbes lahir dari keluarga miskin, namun religius. Orang tuanya merupakan seorang pendeta. Meski lahir dari keluarga miskin, Hobbes dapat menyelesaikan pendidikannya di Oxford, Inggris pada 1608. Hobbes pernah bekerja sebagai penerjemah dan penasihat politik. Thomas Hobbes yang dikenal sebagai filsuf politik di Inggris juga menulis buku pada tahun 1651 yang terkenal, berjudul “Leviathan.” Karya tersebut banyak dikaji oleh para sarjana politik hingga kini (Skinner, 1969).

Di dalam tulisannya Hobbes membahas demokrasi dengan menguraikan tentang kontrak sosial. Berbeda dengan tokoh lain, Hobbes menilai, demokrasi adalah sistem pemerintah yang buruk dan lemah. Selain itu Hobbes berpendapat bahwa pemerintahan yang baik adalah monarki. Hal ini tidak lepas dari kondisi politik yang terjadi pada saat itu, yaitu konflik antara Gereja Anglikan, dengan Raja Charles I. Konflik tersebut berujung pada pemenggalan kepala Raja Charles I, atas perintah Oliver Cromwell. Kematian Raja Charles I membuat Inggris menjadi negara yang lemah, dan tidak lagi menjadi negara kuat secara politik, karena dipimpin oleh sebuah komisi. Sistem monarki diganti dengan sistem persemakmuran yang dipimpin oleh Cromwell (Brown, 1980).

Hobbes menilai pemerintah merupakan alat untuk menjamin keamanan bersama. Penguasa atau otoritas politik dibenarkan atas dasar kontrak sosial, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan kepada semua orang yang telah mengikat dirinya dalam kontrak sosial. Hobbes membenarkan tindakan penguasa yang mementingkan diri karena sudah mendapat persetujuan melalui kontrak sosial yang diberikan sebelumnya (Nursanik & Mursidah, 2020).

### Demokrasi Menurut Montesquieu

Montesquieu yang memiliki nama lengkap <sup>63</sup> Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu lahir di La Brède, Perancis pada tanggal 18 Januari 1689. Pemikiran Montesquieu tentang dituangkan di dalam tulisannya yang berjudul “L>esprit des Lois.” Untuk menegakkan negara demokrasi, Montesquieu mendorong <sup>20</sup> adanya pemisahan cabang kekuasaan yang mencakup kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Legislatif membuat undang-undang, eksekutif melaksanakan undang-<sup>20</sup>undang dan yudikatif menegakkan peraturan perundang-undangan. Ketiga cabang kekuasaan itu berada dalam posisi yang terpisah satu sama lain, tidak berada di dalam tangan satu orang (Shackleton, 1952).

Montesquieu dianggap sebagai pelopor konsep tri as politica yang sekarang banyak dianut di dalam negara demokrasi modern. Pemikiran mengenai tiga cabang kekuasaan tersebut yang disebut dengan “trias politica” itu ditegaskan oleh muridnya Montesquieu yang bernama Immanuel Kant. “Tri” artinya tiga “as” artinya poros dan “politica.” Jadi konsep yang dikemukakan oleh Montesquieu menegaskan ada tiga cabang kekuasaan di dalam pemerintah demokrasi (Suherman, 2019).

Bagi Montesquieu, pemisahan poros kekuasaan merupakan hal mutlak yang harus ada di dalam <sup>70</sup> negara. Hal ini dilakukan supaya kekuasaan tidak absolut, bila berada di tangan satu orang. Kekuasaan yang terpisah berjalan secara paralel sesuai dengan tugas dan fungsinya, kemudian saling melakukan kontrol satu sama lain. Secara ini hal tersebut akan dapat mencegah terjadinya penyimpangan kekuasaan yang berpotensi dilakukan oleh penguasa (Sugiono & Husni, 2000).

## Demokrasi Menurut Jeremy Bentham

Jeremy Bentham lahir di London, Inggris pada 15 Februari 1748. Bentham dikenal sebagai orang yang cerdas sejak kecil. Pada usia 12 tahun dia sudah masuk Oxford dan lulus pada usia 15 tahun. Bentham kemudian sebagai tokoh yang beraliran utilitarianism, positivism, dan liberalism. Perhatiannya cukup besar pada persoalan, moral dan etika di dalam politik. Sebagai seorang yang memiliki pandangan yang liberal dalam politik, Bentham menilai bahwa demokrasi di dalam politik, meniscayakan adanya kebebasan. Kebebasan di dalam kegiatan politik harus terus dilestarikan, jangan sampai musnah. Sebagai seorang yang memiliki perhatian terhadap etika dan moral, maka Bentham menilai, bahwa diperlukan kebijaksanaan dan keberanian di dalam menjalankan undang-undang yang menjamin kebebasan politik warga negara (Lieberman, 2008).

Jeremy Bentham memiliki pemikiran yang revolusioner, yang merasa tidak puas dengan kondisi politik yang terjadi di Inggris. Bentham dianggap sukses melakukan perubahan sosial bagi masyarakat Inggris, dengan ide dan pikiran yang kemudian dianut oleh para pengagum dan pendukungnya. Sebagian reformasi yang terjadi di Inggris ada sumbangsih Bentham, diantaranya mengenai hak pilih orang dewasa, hak pilih perempuan, reformasi pemerintahan, kebebasan berbicara termasuk kebebasan pers, dan lain-lain. Sebagai seorang liberal, Bentham sangat menekankan kepemilikan dan hak pribadi yang tidak boleh diganggu, apalagi dirusak oleh apapun. Namun sebagai orang yang mendasarkan pemikirannya pada hukum dan etika, maka kepemilikan dan kebebasan pribadi tersebut dapat diambil dengan undang-undang, seperti yang terjadi pada penarikan hak milik pribadi, berupa pembayaran pajak yang diwajibkan oleh negara (Viner, 1949).

## Demokrasi Menurut Robert Dahl

Robert Dahl, yang memiliki nama lengkap Robert Alan Dahl lahir di Inwood, Iowa, AS pada tanggal 17 Desember 1915. Dahl memang dikenal memiliki perhatian terhadap studi ilmu politik. Sejak 1946 sampai pensiun 1986 ia bertugas di Fakultas Ilmu Politik Universitas

Yale. Selain itu, ia juga merupakan profesor ilmu politik di Eugene Meyer pada tahun 1955-1964. Dahl juga menjadi Presiden Asosiasi Ilmu Politik Amerika pada tahun 1966. Berkaitan demokrasi, Dahl memiliki yang cukup terkenal "Democracy and its Critics." Dahl memiliki pemikiran strukturalis yang percaya bentuk pemerintahan demokrasi adalah negara bangsa, sebagai kelanjutan dari negara kota yang telah berjalan sejak awal kemunculan demokrasi. Namun Dahl masih memiliki keraguan terhadap tidak adanya jaminan bagi penyelenggara negara dan pemegang kekuasaan untuk dapat menyelenggarakan kekuasaan untuk melayani kepentingan publik. Sehingga, Dahl menyebut demokrasi sebagai sesuatu yang baik. Masalah yang terjadi pada demokrasi adalah pada pelaksanaan, bukan pada demokrasinya (Dahl, 1967).

Supaya demokrasi dapat berjalan dengan cita-cita dan keinginan, maka ada beberapa kriteria pemerintahan yang menjalankan sistem politik demokrasi. *Pertama*, adanya partisipasi efektif di kalangan warga negara terhadap proses pengambilan keputusan dan jalannya roda pemerintahan. *Kedua*, adanya kesetaraan di dalam pemberian suara, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam memberikan suara, tidak ada hak khusus bagi kelompok tertentu di dalam proses pemberian suara. *Ketiga*, pemahaman yang mencerahkan antara para penyelenggara demokrasi dan warga negara. *Keempat*, kontrol terhadap kegiatan. *Kelima*, Keterlibatan warga dewasa (Dahl, 1977).

### Demokrasi Menurut Ibn Rusyd

Ibn Rusyd, yang memiliki nama lengkap <sup>50</sup> Abu al-Walid Muhammad ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ahmad ibnu Rusyd, lahir di Cordoba, Andalusia pada tahun 520 H/ 1126 M. Ibn Rusyd berasal dari keluarga terhormat dan terkenal keilmuannya. Kakek dan ayahnya adalah seorang qadhi di Cordoba dan juga seorang ahli fiqih terkenal dari mazhab Maliki. Lahir dan tumbuh di tengah keluarga yang bersemangat terhadap ilmu pengetahuan, menyebabkan Ibn Rusyd menguasai berbagai bidang ilmu; mulai dari kedokteran, filsafat, hingga ilmu politik (Siraj & Nor, 2020).

Ibn Rusyd menuangkan pemikirannya mengenai politik dan demokrasi pada tulisannya berjudul "Al-Dlarury fi al-Siyasah." Ibn Rusyd menggambarkan kota demokrasi sebagai kota yang keberadaan individu bebas dari semua belenggu, dan bebas pula menjalankan aktivitas yang disukai. Dengan begitu setiap individu dapat bergerak ke arah kemajuan sesuai dengan fitrahnya dan kecenderungan alami. Di kota ini tumbuh kelompok sosial dengan kemampuan dan keahlian yang beragam. Kota ini berpeluang menjadi kota utama (*al-madinah al fadhilah*) (Fauzan, 2015).

Pemikiran Ibn Rusyd mengenai negara utama merupakan pemikiran yang ideal, sebagaimana Plato dan al-Farabi mengemukakan mengenai kota utama. Ibn Rusyd mendasarkan kota utama pada manfaat bersama. Setiap orang yang hidup bebas di kota utama, dengan berbagai keahlian yang dimiliki, bebas pula menjalani pekerjaan yang ditekuni. Namun setiap orang dengan pekerjaan yang dimiliki harus memberi manfaat dan kebaikan kepada kehidupan bersama. Seorang dokter yang memiliki keahlian mengobati, harus memiliki dampak pada kebaikan berupa kesehatan masyarakat umum. Kemampuan dokter untuk mengobati, tidak hanya untuk dirinya saja (Halimatuzzahro, 2017).

### Demokrasi Menurut J urgen Habermas

J urgen Habermas lahir di Dusseldorf, Jerman pada tanggal 18 Juni 1929. Habermas aktif sebagai peneliti di Institut Penelitian Sosial di Frankfurt, di tempat tersebut ia asisten Theodor Adorno pada tahun 1956. Habermas menjadi profesor di bidang filsafat dan sosiologi yang mempelajari demokrasi pada masyarakat modern. Pada tahun 1982 Habermas mengemukakan gagasan demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif menggugat model demokrasi perwakilan yang tidak menempatkan rakyat dalam proses penempatan hukum secara menyeluruh. Menurut Habermas, demokrasi deliberatif memberi sorotan tajam terhadap prosedur pembuatan Undang-undang. Semestinya terjadi dialog dan diskursus baik formal maupun nonformal, antara legislatif dengan masyarakat sipil. Demokrasi deliberatif memberikan ruang di luar kekuasaan administratif negara yang menempatkan masyarakat pada

posisi yang sebagai emansipatoris untuk melakukan kegiatan legislasi melalui ruang-ruang publik (Habermas et al., 1974).

Habermas juga mengkritisi demokrasi perwakilan yang nilainya bukan bentuk demokrasi murni. Demokrasi perwakilan merupakan modifikasi dari bentuk kedaulatan rakyat yang paling murni. Demokrasi deliberatif harus memberi ruang publik yang menjamin kebebasan dan sifat kritis dari masyarakat sipil. Bebas artinya setiap pihak dapat berbicara dimana saja, berkumpul, dan berpartisipasi dalam kegiatan politik. Kritis berarti siap dan mampu secara adil dan bertanggung jawab menyoroti proses pengambilan keputusan untuk kepentingan publik. Ini hal paling mendasar dalam demokrasi, sehingga setiap warga negara memiliki peluang yang sama dan kesempatan yang sama untuk mengarahkan kebijakan negara dengan yang diinginkan. Setiap kebijakan publik harus diperdebatkan dulu dan disahkan oleh publik (Habermas, 2018).

## SEJARAH DEMOKRASI

Demokrasi pertama kali dikenalkan di Athena, Yunani, beberapa abad Sebelum Masehi sampai abad ke-5 Masehi. Saat itu masyarakat Yunani dibagi pada negara kota yang jumlah penduduknya rata-rata sebanyak 10.000 jiwa. Pada masa itu, demokrasi dikenal sebagai sistem pemerintahan buruk. Tidak banyak orang yang tertarik terhadap sistem demokrasi. Sehingga sistem demokrasi tidak begitu berkembang. Pada saat itu, demokrasi dikenalkan dalam praktik kebebasan setiap orang untuk berbicara mengenai apapun secara bebas (Subandi, 2017).

Demokrasi juga terjadi pada abad ke-7 tepatnya pada tahun 622 di Madinah, Arab. Pelopor demokrasi adalah tokoh perubahan di Arab yang melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Demokrasi yang dibawa oleh Muhammad SAW tercantum dalam Piagam Madinah. Nilai demokrasi yang terkandung di dalam Piagam Madinah, kebebasan, kesetaraan, kompromi, dan lain-lain. Ada yang menyebut demokrasi yang ada di dalam Piagam Madinah menunjukkan ciri-ciri demokrasi modern (Shobahah, 2019).

Kemudian, pada abad ke-18, tepatnya pada tahun 1789 terjadi Revolusi Prancis. Kelahiran Revolusi Perancis salah satunya didorong oleh kondisi sosial ekonomi negara yang dikuasai oleh segelintir elit, baik elit ekonomi maupun elit agama. Maka beberapa kalangan mendorong supaya kekuasaan dikembalikan kepada rakyat, dan orang berkuasa harus mengemban amanah rakyat, tidak atas nama Tuhan, atau untuk kepentingan ekonomi diri dan keluarga semata (Supardan, 2016). Pada tahun 1788 di Amerika mulai menganut demokrasi, lewat ratifikasi konstitusi yang mendasarkan pemerintahan yang memisahkan cabang kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif dan yudikatif (Muttaqin, 2020).

### **Negara Demokrasi Indonesia**

Sejak merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang tahun 1945, Indonesia sesungguhnya sudah menjadi negara demokrasi. Hal ini ditandai dengan adanya pemisahan kekuasaan yang berlaku. Bahkan praktik kekuasaan yang dijalankan di Indonesia di awal kemerdekaan adalah sistem politik parlementer. Kekuasaan tidak semata-mata berada di tangan seorang presiden. Selain presiden ada perdana menteri, yang saat itu dijabat secara bergantian oleh para tokoh pendiri bangsa. Salah satunya disebabkan kondisi politik yang belum stabil. Selain itu ada pula keberadaan parlemen yang dapat mengontrol jalannya pemerintahan, pemilihan umum (pemilu) yang digelar pada tahun 1955 diikuti oleh puluhan partai politik yang berasal dari berbagai kepentingan, kelompok, ideologi dan lainnya.

Hal tersebut berlangsung pada pemerintahan Orde Baru, secara formal pemilihan umum (pemilu) berlangsung secara demokratis dan periodik. Partai politik peserta pemilu juga tetap ada, yang terdiri dari Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Perjuangan (PDI). Ketiga partai tersebut mewakili kelompok politik yang ada di Indonesia, meliputi kelompok nasionalis birokratis dan pengusaha, kelompok Islam dan kelompok nasional. Dalam perjalanannya dominasi terhadap perpolitikan di Indonesia semakin mengarah ke satu kelompok, sehingga kontrol terhadap kekuasaan semakin terbatas.



101 Kondisi tersebut kemudian berubah saat reformasi terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Rezim Orde Baru runtuh, dan kemudian berganti dengan era reformasi. Penyelenggaraan pemilu pertama pada era reformasi pada tahun 1999 diikuti oleh puluhan partai politik yang merupakan representasi berbagai kepentingan, ideologi dan lain sebagainya.

### Sejarah Demokrasi di Indonesia

Sejarah demokrasi di Indonesia bisa dilihat pada sejarah kelahiran Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat secara penuh. Sebelum dijajah oleh Belanda dan Jepang, wilayah yang sekarang menjadi Indonesia, merupakan wilayah yang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan atau kesultanan yang dikuasai secara turun-temurun oleh berbagai kekuatan yang ada. Di Jawa ada Kerajaan Majapahit yang terkenal luas wilayah kekuasaannya. Selain itu ada Kerajaan Singosari. Di luar Jawa, dikenal Kerajaan Samudera Pasai, dan berbagai kerajaan lain yang eksis memerintah. Setelah Belanda masuk ke wilayah nusantara, maka kekuasaan yang selama ini berada di tangan kerajaan-kerajaan tersebut beralih ke tangan Belanda. Sebagai bagian dari kolonialisme, maka Belanda menjalankan kekuasaan dengan tangan besi non demokrasi. Tidak ada pemilihan umum, semua dikendalikan oleh Belanda, siapa yang akan menjadi penguasa di suatu daerah, atas kemauan Belanda, rakyat tidak memiliki hak apapun. Saat kekuasaan Belanda digantikan oleh Jepang di nusantara, Jepang juga mengendalikan dengan sistem kekuasaan yang terpusat, tidak ada demokrasi.

Kemerdekaan Indonesia dari penjajah Jepang dan Belanda merupakan babak baru dalam kehidupan politik Indonesia. Kehidupan demokrasi mulai mulai terwujud. Kedaulatan rakyat mulai dibangun. Pertama kali dibangun mulai dari dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila mengakomodasi nilai-nilai demokrasi, terutama sila keempat mengenai permusyawaratan. Begitu pula sila kelima berbicara mengenai keadilan sosial. Praktik demokrasi kemudian berjalan paralel dengan banyaknya partai politik yang lahir, tumbuh dan mengikuti berbagai kontestasi demokrasi yang digelar pada berbagai level, hingga kini. Ada pemilihan wakil rakyat, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah.

## Peluang dan Tantangan Demokrasi di Indonesia

Perjalanan demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia memberi pelajaran penting bagi bangsa, bahwa Indonesia pernah mengalami masa bulan madu dan jaya demokrasi. Hal tersebut misalnya terlihat pada pemilihan umum (pemilu) yang digelar pada tahun 1955. Pemilu pertama yang digelar secara demokratis, tanpa kecurangan, tanpa money politics, setiap partai bebas melakukan kampanye dan meyakinkan pemilih sesuai dengan asas-asas demokrasi. Hal yang sama juga terjadi pada pemilu tahun 1999, pemilu yang juga diikuti oleh puluhan partai politik secara bebas, tanpa ada tekanan politik, dan bebas dari pengaruh politik uang dan kekuatan lain yang mengebiri kedaulatan rakyat.

Demokrasi Indonesia juga pernah mengalami masa suram, di mana pada masa Presiden Soekarno berkuasa juga menjalankan politik otoriter, dengan menyatakan diri presiden seumur hidup. Soekarno juga membubarkan partai politik yang kritis terhadap pemerintahannya seperti yang dilakukan partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Tidak hanya itu, Soekarno juga memenjarakan banyak lawan politiknya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Presiden Soeharto dengan memasung kebebasan rakyat melalui pemberlakuan Pancasila sebagai asas tunggal untuk semua partai politik<sup>78</sup> dan organisasi masyarakat di Indonesia. Kemudian penggabungan partai-partai politik yang ada di Indonesia menjadi tiga partai saja, Golkar, PPP dan PDI.

Di tengah kebebasan berdemokrasi yang lahir setelah era reformasi di Indonesia, proses pemasangan kebebasan rakyat tidak secara langsung dilakukan oleh pengusaha, namun oleh kekuatan yang disebut dengan oligarki. Oligarki yang memiliki kekuatan uang dan modal mengendalikan politik Indonesia. Sehingga tidak memiliki kedaulatan dalam memilih, tapi uang yang menentukan.

## Negara Demokrasi Amerika Serikat

Amerika termasuk negara yang sudah cukup lama menggunakan sistem politik demokrasi. Bila dilihat dari kemerdekaan dari Inggris, setidaknya Amerika sudah menggunakan demokrasi secara formal pada tahun 1777. Sejak saat itu Amerika Serikat hingga kini telah

menjadi negara demokrasi. <sup>16</sup> Demokrasi yang dipakai oleh Amerika Serikat merupakan akar dari demokrasi ala tokoh Alexis de Tocqueville. Demokrasi yang diharapkan mampu menghidupkan kepercayaan masyarakat di dalam memperbaiki pemerintahan (Allen, 1998).

Semangat pada tokoh Amerika Serikat di dalam mempromosikan demokrasi ke seluruh dunia, membuat Amerika Serikat mendapat gelar kampiun demokrasi. Dilihat dari demografi, atau jumlah penduduk, sebetulnya Amerika bukan negara dengan penduduk terbanyak yang menggunakan demokrasi dalam sistem politik dan pemerintahan. Selain Amerika, India merupakan negara dengan penduduk terbanyak yang menggunakan sistem demokrasi. Namun karena Amerika terlihat sangat peduli terhadap persoalan demokrasi di dunia. Bahkan untuk alasan pemerintahan yang tidak demokratis Amerika Serikat memerangi Irak dan membunuh pemimpin yang dianggap otoriter, yaitu Saddam Husein.

Memang harus diakui, bahwa pelaksanaan demokrasi di Amerika Serikat berlangsung secara damai dan tidak menimbulkan gejolak sosial politik. Pergantian kekuasaan di Amerika Serikat selalu berlangsung secara damai, sistematis dan menjunjung tinggi demokrasi. Pihak yang kalah pada pemilihan presiden biasanya bersedia membantu pemerintahan yang menang pada kontestasi pemilihan presiden. Begitu pula dengan kampanye calon presiden berlangsung secara damai.

### **Sejarah Demokrasi di Amerika Serikat**

Demokrasi di Amerika Serikat lahir pada abad ke-18. Demokrasi di Amerika Serikat ditandai dengan adanya deklarasi kemerdekaan dari Inggris yang digagas oleh Thomas Jefferson. Deklarasi yang dikemukakan oleh Jefferson kemudian mendapat persetujuan 13 pemerintah persekutuan negara yang lebih dikenal dengan sebutan “Continental Congress” yang menyatakan bergabung sebagai perserikatan negara “The United State of America” sebagaimana diatur dalam konstitusi yang dikenal sebagai “The Articles of Confederation 1777”. Hal tersebut menjadi momen penting kemerdekaan Amerika dari Inggris. Deklarasi kemerdekaan tersebut sekaligus menjadi deklarasi hak asasi manusia

dan demokrasi di Amerika Serikat. Pada tahun 1787 konstitusi Amerika Serikat diperbaiki melalui “Philadelphia Constitutional Convention.” (Bishry, 2019).

Presiden pertama Amerika Serikat adalah George Washington yang menjabat pada tahun 1732 sampai tahun 1799. Washington kemudian digantikan John Adams yang menjadi presiden pada tahun 1735 sampai dengan tahun 1826. Sedangkan penggagas deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat, yaitu Thomas Jefferson menjadi presiden ketiga, yang menjabat pada tahun 1743 sampai dengan tahun 1826. Selain Thomas Jefferson yang dikenal sebagai penggagas kelahiran Amerika Serikat, tokoh demokrasi yang cukup terkenal hingga kini adalah Abraham Lincoln. Lincoln menjadi presiden pada 1861 sampai 1865. Lincoln menjadi presiden Amerika Serikat di tengah situasi yang cukup pelik, banyak persoalan politik yang terjadi pada saat ia menjadi presiden. Lincoln dibunuh pada tahun 1865. Salah satu ucapan Lincoln paling terkenal tentang demokrasi adalah “From the people by the people for the people.” (Schwartz & Schuman, 2005).

### **Peluang dan Tantangan Demokrasi di Amerika Serikat**

Meski mendapat julukan negara demokrasi terbesar di dunia, demokrasi di Amerika Serikat juga menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut bila dipetakan terdiri dari dua. *Pertama*, politik dalam negeri. Di dalam negeri ada fenomena kebangkitan politik populisme. Hal ini ditandai dengan apa yang dilakukan oleh Donald Trump dan para pendukungnya. Trump sejak kampanye pencalonan sebagai Presiden Amerika Serikat menunjukkan gejala populisme. Paling tidak ditandai dengan dua hal. Trump anti terhadap imigran yang berasal dari Timur Tengah, termasuk juga Mexico. Selain itu Trump seperti menunjukkan ketidaksukaannya terhadap kaum muslim yang berada di Amerika Serikat. Namun di sisi lain, Trump juga bersikap demokratis terhadap para pengkritiknya. Di awal-awal aksi unjuk rasa anti Trump, ia menanggapi dengan santai, tanpa reaksi berlebihan. Namun belakangan Trump juga menunjukkan sifat yang anti demokrasi. Banyak pengunjuk rasa yang terlibat dalam aksi kekerasan dengan aparat kepolisian. Trump sendiri diam tidak merespon peristiwa tersebut.

*Kedua*, politik luar negeri Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat sering memberlakukan standar ganda, dalam menegakkan demokrasi di beberapa negara di dunia. Dengan alasan menjadi negara otoriter yang tidak memberi kesempatan bagi oposisi Amerika Serikat menyerang Irak, membombardir kota-kota bersejarah di Irak, hingga kemudian membunuh Saddam Hussein pemimpin yang dianggap otoriter dan bertangan besi. Amerika Serikat ke Irak dengan alasan mencari senjata pemusnah massal yang dibuat oleh Saddam. Namun pada peristiwa lain, Amerika Serikat membiarkan Presiden Mesir, Muhammad Mursi yang terpilih secara demokratis dikudeta.

### **Negara Demokrasi Korea Selatan**

Perjalanan Korea Selatan menjadi negara demokrasi juga cukup panjang. Kini, setelah Korea Selatan menjadi negara demokrasi telah mencatat angka pertumbuhan ekonomi yang cukup menakjubkan. Banyak kalangan menyebut Korea Selatan sebagai keajaiban Asia “the miracle of Asia”. Kemajuan pesat di Korea Selatan semakin terlihat pada tahun 2005, saat Korea Selatan tumbuh menjadi negara industri utama, yang bersaing dengan negara yang pernah menjajahnya, Jepang. Sebagai negara industri utama, Korea Selatan menjadi produsen peralatan elektronik terbesar yang memproduksi telepon genggam, monitor komputer layar datar, televisi layar datar, dan berbagai peralatan elektronik lainnya. Selain itu, Korea Selatan juga menjadi produsen otomotif dan berbagai peralatan pendukung lainnya, seperti ban dan industri bahan serta lainnya (Darini, 2010).

Pada tahun 2019 misalnya, World Economic Outlook membeberkan data mengenai pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) Korea Selatan yang mencapai 2,6% melampaui Inggris yang hanya mencapai 1.2%. GDP merupakan indikator yang paling banyak digunakan di dalam mengukur tingkat kesejahteraan suatu negara. Capaian yang diperoleh Korea Selatan di dalam kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, tidak lepas dari iklim demokrasi yang memberi kesempatan kepada warga negara untuk partisipasi dalam membangun perekonomian di Korea Selatan (Fauziah, 2019). Korea Selatan menjadi satu negara

demokrasi yang mampu memadukan kebebasan melalui partisipasi yang tinggi di kalangan warga negara dengan, dengan etos kerja dan budaya disiplin masyarakat Korea Selatan, serta nilai kepasrahan terhadap apa yang menjadi budaya leluhur. Sebuah kombinasi yang menunjukkan hasil positif.

### Sejarah Demokrasi di Korea Selatan

Sebelum menjadi negara demokrasi seperti yang terjadi saat ini, Korea Selatan menjadi satu dengan Korea Utara yang disebut sebagai Semenanjung Korea. Semenanjung Korea terdiri dari tiga kerajaan yang berkuasa, yaitu Kerajaan Goguryeo, Kerajaan Baekje, dan Kerajaan Silla (Avalokitesvari, 2018). Korea Selatan pernah menjadi daerah jajahan Jepang sejak tahun 1905 sampai tahun 1945. Perang Dunia II menyebabkan kekalahan di pihak Jepang membuat Korea Selatan menuju kemerdekaan. Pembentukan Korea Selatan menjadi negara merdeka dimulai pada tanggal 13 Agustus 1948, dengan deklarasi pembentukan yang dilakukan oleh Syngman Rhee sebagai presiden pertama Korea Selatan di Seoul. Kemudian pada tanggal 8 September 1951, dibuat Perjanjian San Francisco, yang salah satu pasalnya berbunyi “Jepang mengakui Kemerdekaan Korea, dan melepaskan semua hak kepemilikan dan klaim atas Korea, termasuk Kepulauan Quelpart, Pelabuhan Hamilton dan Dagelet.” (Hennida et al., 2016). Hingga tahun 1953 Korea dilanda perang yang membuat kondisi politik dan ekonomi di Korea belum sepenuhnya stabil. Hingga tahun 1960 kondisi politik Korea Selatan juga masih diwarnai berbagai kisruh politik internal. Pada tahun 1970-an, masyarakat sipil di Korea Selatan berusaha untuk memperjuangkan kedudukan terhadap negara. Mereka menentang rezim diktator pada saat itu. Buruh melakukan gerakan menuntut demokratisasi di dunia perburuhan. Sejak tahun 1980-an bermunculan tokoh-tokoh politik baru Korea. Gerakan Demokrasi Gwangju terus membawa iklim demokrasi di Korea Selatan. Pada tanggal 29 Juni 1987 lahir referendum konstitusi yang mengubah Korea Selatan menjadi negara yang lebih demokratis. Hal ini dimulai dari kepemimpinan Presiden Chun Doo Hwan (Cotton, 1989).

## **Peluang dan Tantangan Demokrasi di Korea Selatan**

Masyarakat Korea Selatan memiliki kelas menengah yang terdiri dari pekerja dan mahasiswa yang sadar terhadap kehidupan demokrasi. Mereka terus menjadi motor penggerak demokrasi. Pada waktu tertentu mereka tidak segan turun ke jalan berhari-hari menuntut demokratisasi kehidupan politik di Korea Selatan. Pada sisi lain, ada kecenderungan pada masyarakat Korea Selatan yang cenderung menerima apa yang menjadi kebijakan pemerintah yang berkuasa di Korea Selatan. Hal ini tidak lepas dari ideologi Konfusianisme.

Konfusianisme, sebagai ajaran dan ideologi yang mayoritas dianut oleh masyarakat Korea Selatan. Dalam ajaran Konfusianisme tingkat kepasrahan dan penerimaan yang tinggi terhadap apa yang terjadi. Hal ini juga membawa pengaruh terhadap kehidupan politik di Korea Selatan. Penganut Konfusianisme menerima sepenuhnya semua apa yang diputuskan dan dijalankan oleh pemerintah, mereka sepenuhnya ikut terhadap apa yang diputuskan presiden bersama birokrasi pemerintahannya. Keberlangsungan negara berada di tangan presiden, masyarakat tidak perlu ikut andil, terlibat dalam pengurusan pemerintahan (Oktaviani & Mulyana, 2018).

Hal ini membuka peluang penyimpangan dari kehidupan demokrasi yang meniscayakan adanya keterlibatan masyarakat secara luas di dalam pengelolaan pemerintahan. Keyakinan sebagian besar warga Korea Selatan dimanfaatkan oleh aparat pemerintah untuk menjalankan pemerintah dengan sesuka hati, dengan pemerintahan berjalan secara otoriter. Ini yang memicu aksi massa pekerja dan mahasiswa pada tahun 1980 yang menolak tindakan otoriter pemerintah, dan menuntut penegakan kembali kehidupan demokrasi di Korea Selatan.

## **PANDEMI COVID-19**

Beberapa kalangan, berbeda berpendapat mengenai apa itu yang disebut dengan pandemi. Ada yang menyatakan bahwa pandemi identik dengan tingkat penularan eksplosif. Ada pula yang berpendapat bahwa tingkat keparahan infeksi harus dipertimbangkan. David Morens

dan kawan-kawan mencoba merumuskan makna pandemi dengan mengutip sejumlah sumber. Morens menyebut definisi epidemi<sup>86</sup> sebagai penyakit yang terjadi pada skala luas terjadi pada wilayah yang biasanya mempengaruhi sebagian besar populasi. Kemudian terjadi distribusi atau menyebar secara luas di seluruh wilayah, negara, benua atau global. Penggunaan kata pandemi pertama kali digunakan pada tahun 1666, merujuk pada “pandemi, atau endemik, atau lebih tepatnya penyakit vernakular (penyakit yang selalu merajalela di suatu negara).” Dua abad kemudian, tepatnya pada tahun 1828, ahli epidemiologi dan leksikografer edisi pertama Kamus Webster Noah Webster mendaftarkan epidemi dan pandemi sebagai istilah sinonim. Webster menyebut pandemi influenza tahun 1789-1790, yang merupakan satu-satunya peristiwa influenza Amerika. Pandemi influenza tahun 1889 dan 1918 mungkin telah mengkodifikasikan arti kata pandemi untuk sementara (Morens et al., 2009).

Marco Ciotti dan kawan-kawan mencoba merumuskan apa yang dimaksud dengan covid-19. Covid-19 semacam virus corona baru yang terkait dengan SARS-CoV, dan oleh karena itu dinamai virus corona sindrom pernapasan akut yang parah (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 adalah betacoronavirus yang termasuk dalam subgenus Sarbecovirus. Virus tersebut kemudian menyebar secara cepat ke berbagai negara di dunia dan menyebabkan kematian hingga mencapai jutaan jiwa. Hal tersebut yang menjadi dasar Covid-19 sebagai pandemi (Ciotti et al., 2020).

## DEMOKRASI DI MASA PANDEMI COVID-19

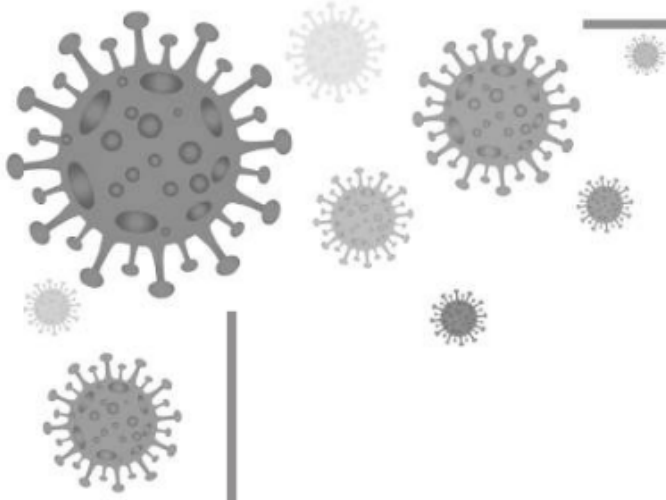
Beberapa negara demokrasi, menghadapi persoalan ganda. Pada satu sisi harus melakukan pencegahan dan penanganan pandemi covid-19, salah satunya dengan menjaga jarak dan menghindari kerumunan (Khan et al., 2021). Namun pada saat yang lain, harus menyelenggarakan pemilihan umum, yang tentu saja mengundang orang untuk datang ke tempat pemungutan suara. Seperti yang dialami Amerika Serikat (Norris & Gonzalez, 2020). Kondisi ini menjadi potensi penyebaran covid-19 (Landman & Splendore, 2020). Selain itu, kandidat yang ikut



kontestasi pemilihan umum juga melakukan kegiatan kampanye yang mengumpulkan massa dalam jumlah banyak. Mereka datang ke satu tempat yang sama untuk mengikuti kampanye yang dilakukan oleh kandidat. Begitu pula dengan panitia penyelenggara pemilihan, terlibat dalam pertemuan atau rapat yang melibatkan orang dalam jumlah banyak (Rusydi & Sulchan, 2020). Perjuangan untuk mengatasi covid-19 semakin berat, tantangan semakin beragam.

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi yang menyelenggarakan pesta demokrasi berupa pemilihan kepala daerah di tengah pandemi covid-19 (Mutiarasari & Herawati, 2020). Sedikitnya ada 270 wilayah di Indonesia yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, sembilan tingkat provinsi, 224 tingkat kabupaten, dan 37 kota (Rosanti, 2020). Tingginya angka penyebaran covid-19 di Indonesia sempat menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah yang mestinya digelar pada Juni 2020, ditunda ke Bulan Desember 2020 (Haridison et al., 2020). Pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada Bulan Desember 2020 juga dikritik banyak kalangan. Namun pemerintah tetap melaksanakan, dengan risiko tingginya potensi penyebaran covid-19 (Ramadani & Rezah, 2021).





## METODE PENELITIAN

### RANCANGAN PENELITIAN

Penelitian ini dirancang studi komparatif, untuk mengkaji dan menganalisis beberapa negara demokrasi yang ada di berbagai wilayah di dunia, yaitu Indonesia, Amerika Serikat dan Korea Selatan. Studi dan analisis ketiga negara tersebut kemudian dilakukan studi komparatif, yaitu membandingkan bagaimana kondisi covid-19 di ketiga negara tersebut. Diperbandingkan pula bagaimana kondisi demokrasi di ketiga negara demokrasi tersebut. Selain itu diperbandingkan pula bagaimana ketiga negara tersebut mengatasi pandemi covid-19. Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan mengatasi covid-19 dan faktor apa saja yang menjadi penghambat.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian mendeskripsikan kondisi negara-negara demokrasi yang sedang menghadapi pandemi covid-19. Dideskripsikan juga mengenai tantangan

di dalam menghadapi pandemi baik pandemi covid-19. Selain itu dideskripsikan juga sejarah dan dinamika demokrasi di negara tersebut. Dideskripsikan pula faktor-faktor yang menjadi pendukung keberhasilan negara demokrasi dalam mengatasi pandemi, dan faktor apa saja yang menjadi penghambat.

### **FOKUS PENELITIAN**

1. Sejarah negara demokrasi menghadapi pandemi.
2. Tantangan negara demokrasi menghadap pandemi covid-19.
3. Upaya negara demokrasi, Indonesia, Amerika dan Korea Selatan menghadapi pandemi covid-19.

### **LOKASI PENELITIAN**

Penelitian ini berlokasi di tiga negara demokrasi, yaitu Indonesia, Amerika Serikat dan Korea Selatan. Ketiga negara tersebut dipilih, sebagai negara yang merupakan negara demokrasi, yang berhasil dan gagal di dalam menghadapi pandemi covid-19.

120

### **INSTRUMEN PENELITIAN**

Instrumen yang digunakan di dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang menggunakan perangkat ketik seperti laptop, *gadget*, dan beberapa perangkat lain.

### **SUMBER DATA**

Data yang dikumpulkan diperoleh dari beberapa sumber, yaitu; media online yang terbit atau publish di ketiga negara demokrasi, yaitu Indonesia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan, serta beberapa media online lain yang terbit di luar ketiga negara tersebut. Selain dari media online, data juga diperoleh dari berbagai jurnal nasional dan internasional yang mengulas berbagai penelitian berkaitan dengan covid-19 dan demokrasi.

## TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran dokumen yang ada di berbagai media online dan jurnal yang terbit online di Indonesia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan dan lain-lain.

## TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data menjadi satu bagian yang cukup penting atau bahkan bisa jadi paling penting dari tahapan penelitian. Sebab salah menganalisis data, akan salah pula dalam pembahasan dan penyajian hasil penelitian. Analisis data yang baik juga akan menghasilkan ulasan dan sajian penelitian. Menganalisis data tak ubahnya seperti pekerjaan menafsirkan data, mengatur, mengurutkannya sesuai dengan kaidah penelitian yang baik dan berkualitas. Analisis data di dalam penelitian ini mengacu kepada analisis data yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (Bungin, 2015: 148). Analisis data dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi, kemudian melakukan identifikasi, dilanjutkan dengan revisi dan pengecekan ulang terhadap data yang ada.
2. Melakukan kategorisasi terhadap informasi yang didapat.
3. Menelusuri dan menjelaskan informasi yang telah dikategorisasikan.
4. Menjelaskan hubungan-hubungan informasi yang dikategorisasikan.

## KEABSAHAN DATA

Untuk mendapatkan data yang absah, maka dilakukan langkah-langkah berikut:

1. Reduksi data. Yaitu proses mengorganisasi, mengelompokkan, dan menganalisis teks atau bahan visual yang telah dikumpulkan mulai awal penelitian, bahkan sebelum tahap pengumpulan data sekalipun. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah melakukan klasifikasi data dengan memberikan kode atau simbol terhadap setiap kategori informasi.

2. Penyajian data. Yaitu proses penyajian data berdasarkan kategori yang telah dibuat pada tahap reduksi data. Melalui penyajian data dapat dilakukan eksplorasi, deskripsi, menjelaskan, dan memprediksi fenomena. Penyajian data ini dilakukan mulai setiap kategori, selanjutnya dikonsolidasikan atau dikombinasikan, sehingga dapat dilakukan korelasi-korelasi antar kategori. Kombinasi data ini dapat dilakukan melalui penyusunan matriks atau jaringan baik dalam bentuk tabel maupun gambar (Hays & Singh, 2012: 318). Melalui penyajian data ini maka dapat diambil penjelasan-penjelasan dari setiap kategori, sehingga dapat digunakan untuk menginterpretasikan temuan data penelitian.
3. Verifikasi data. Yaitu melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian data yang telah disusun dengan menggunakan metode triangulasi. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya distorsi data dan informasi yang telah diperoleh, sehingga dilakukan cek dan ricek, mengecek ulang data yang diperoleh, dengan sumber atau dengan data lain yang terkait. Triangulasi dilakukan antara data dengan sumber, atau antara sumber dengan sumber lain, atau data dengan data lain.

## PENYAJIAN DATA

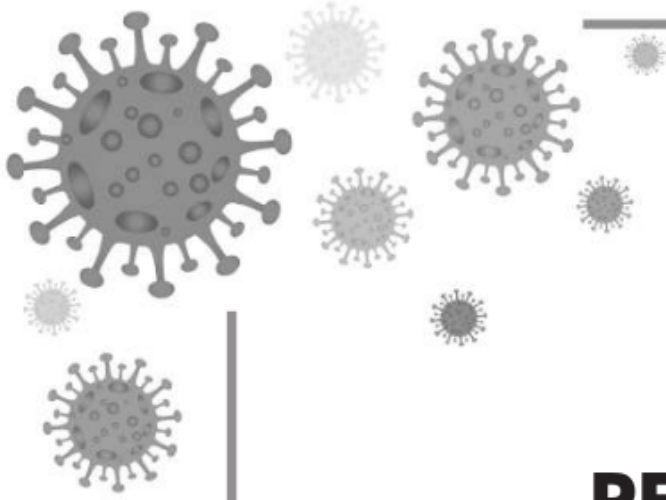
Data yang diperoleh dikumpulkan dan diklasifikasi sesuai dengan topik dan pembahasan yang relevan. Data tersebut kemudian dianalisis. Sehingga menemukan jawaban dari dua rumusan masalah yang dikemukakan di awal, yaitu menjawab bagaimana negara-negara demokrasi menghadapi pandemi covid-19?

Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tidak dalam bentuk angka, penyajian biasanya berbentuk uraian kata-kata dan tidak berupa tabel-tabel dengan ukuran-ukuran statistik. Sering kali data disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan langsung dari sumber. Selain itu, hasil penelitian kualitatif juga dapat disajikan dalam bentuk deskripsi tentang peristiwa dan pengalaman penting dari kehidupan atau beberapa bagian pokok dari kehidupan seseorang dengan kata-katanya sendiri (*life history*).

Meski begitu tetap saja penelitian ini menyajikan tabel yang ditujukan untuk memudahkan membaca dan menganalisis hal-hal yang sekiranya perlu dibuat tabel. Begitu pula dengan foto-foto terkait dengan penelitian akan disajikan dalam penelitian ini. Sehingga penelitian ini disajikan dalam gambaran yang utuh tidak sepotong-sepotong.







## HASIL DAN PEMBAHASAN

PANDEMI COVID-19 yang terjadi di banyak negara telah menyebabkan kematian jutaan orang. Di antara negara-negara yang mengalami pandemi COVID-19 adalah negara-negara demokrasi, seperti Indonesia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Di Indonesia, hingga 30 Januari 2021, jumlah yang terinfeksi mencapai 1.066.313 orang dan jumlah kematian 29.728 orang. (Nugraheny, 2021). Pada periode yang sama, Amerika Serikat memiliki jumlah warga yang terinfeksi tertinggi, mencapai 26.631.311 kasus dan 449.000 kematian. (Bosman & Donald, 2021). Sedangkan di Korea Selatan, jumlah warga yang terinfeksi mencapai 86.992 orang dan jumlah kematian mencapai 1.557 orang (<http://ncov.mohw.go.kr/en/>). Berikut tabel data korban COVID-19 di tiga negara (Indonesia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan) Januari 2021 (Tabel 1).

**Tabel 1.** Data korban COVID-19 di tiga negara pada Juni 2021. (Sumber: [www.kompas.com](http://www.kompas.com), [www.nytimes.com](http://www.nytimes.com), <http://ncov.mohw.go.kr/en/>, 30 Januari, 2021).

Jenis	Indonesia	Amerika Serikat	Korea Selatan	Dunia
Terpapar	1,066,313 orang	26,631,311 orang	86,992 orang	1174.000.000 orang
Mati	29,728 orang	449,000 orang	1,557 orang	3.750.000 orang

Tiga negara demokrasi; Indonesia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan memiliki fenomena yang sama untuk dianalisis melalui pendekatan sistem politik, sejarah menghadapi pandemi, respon pemerintah, dan biaya penanggulangan COVID-19. Keempat pendekatan di atas dipilih untuk membahas pandemi dan demokrasi karena ketiga negara ini memiliki kesamaan fenomena terkait penanganan COVID-19 pada keempat pendekatan tersebut, meskipun masing-masing memiliki metode penanganan yang berbeda.

## SISTEM POLITIK

### Sistem Politik di Indonesia

Dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai tim ad hoc yang sangat disayangkan karena mekanisme kerjanya yang tumpang tindih. Presiden Joko Widodo membentuk Panitia Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pembentukan panitia tersebut berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 (Intan, 2020). Sebelumnya, Presiden Jokowi membentuk gugus tugas penanganan Covid-19 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020, yang kemudian diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2020. Gugus tugas tersebut dipimpin oleh Doni Monardo (Bramasta, 2020). Padahal banyak menteri lain yang juga ditugasi menangani pandemi COVID-19, seperti Kemenkes, Kemendagri, Polri, dan lain-lain. (Fealy, 2020).

Joko Widodo sebagai perwakilan pemerintah pusat telah menginstruksikan kepada masyarakat untuk menjaga jarak fisik melalui pembatasan sosial yang pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah daerah agar perekonomian masyarakat tetap berjalan. Sebagai perwakilan dari pemerintah pusat, ia berusaha untuk mempertahankan tingkat infeksi dan kematian yang rendah untuk menenangkan warga dan menghindarkan mereka dari ketakutan. Pemerintah pusat juga tidak melarang masyarakat untuk kembali ke kampung halaman sebagai upaya lockdown. Namun, hal sebaliknya dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merekomendasikan untuk menutup ibukota sepenuhnya karena tingkat infeksi yang tinggi dan menutup rute bus ke desa-desa untuk mencegah warga Jakarta menyebarkan virus di daerah lain. (Mietzner, 2020). Mengenai perbedaan kebijakan ini, EP, guru besar Universitas Indonesia, menyatakan, “*Pemerintah Indonesia tidak bisa menghadapi bencana dan pandemi seperti COVID-19. Hal ini terlihat dari belum jelasnya koordinasi antar instansi pemerintah di Indonesia, antar kementerian, pemerintah pusat dengan provinsi, kabupaten dan kecamatan. Menangani pandemi seperti COVID-19 tidak hanya membutuhkan kebijakan tetapi juga memerlukan koordinasi yang baik antar instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah.*” (EP, Guru Besar Universitas Indonesia, dalam Webinar Internasional “Governance and Public Administration Issues in the Di Tengah Pandemi Covid-19: Pengalaman Negara dan Kerjasama Regional”, Kamis, 7 Mei 2020).

### **Sistem Politik di Amerika Serikat**

Pemerintah Amerika Serikat juga memiliki banyak instansi yang ditugaskan untuk menangani pandemi COVID-19. Di antara lembaga-lembaga ini adalah Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS (HHS) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) (Digital.gov, 2020). Lembaga lain termasuk Administrasi Anak dan Keluarga, Administrasi Kehidupan Masyarakat, Dewan Penasihat Pelestarian Sejarah, Komisi Regional Appalachian, Klinik Angkatan Darat, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, Pusat Medicare dan Medicaid, dan Kepala Dewan Pejabat Sumber Daya Manusia (Almeida & Oliveira, 2020).

Kurangnya respon awal Amerika Serikat karena ketidakmampuan atau keenggananannya untuk mengakui ancaman virus telah mengakibatkan pemerintahan Trump gagal melakukan tanggapan yang jelas terhadap COVID-19, meskipun publik sangat menyadari tindakan yang diperlukan. (Bowling et al., 2020). Tanggapan tersebut ditemukan tidak memiliki komitmen politik yang konsisten untuk menyesuaikan institusi yang ada dengan ancaman yang berkembang pesat, terutama ketika mempertimbangkan pengaturan institusional untuk epidemi COVID-19 oleh Amerika Serikat (Carter & May, 2020). Ketika Amerika Serikat mengumumkan kasus pertamanya pada 21 Januari 2020, warga minta pemerintah untuk cepat melacak dan membatasi penyebaran virus. Menanggapi hal ini, Trump menunjuk Wakil Presiden Mike Pence untuk memimpin gugus tugas COVID-19 di tingkat federal. Tindakan yang dilakukan adalah menghentikan upaya mitigasi dan melarang perjalanan wisatawan asing dari 25 negara Eropa (Devi, 2020). Ini menghasilkan apa yang diumumkan pada pertengahan Maret tentang komitmen pemerintahnya. *“Kami menggunakan kekuatan penuh dari pemerintah federal untuk mengalahkan virus, dan itulah yang telah kami lakukan untuk menjadi tidak berguna.”* (Parodi & Liu, 2020). San Francisco adalah kota pertama di AS yang memberlakukan mandat tinggal di rumah; dan California adalah negara bagian pertama yang memberlakukan residensi di seluruh negara bagian. Negara bagian yang paling parah terkena virus, seperti Washington dan New York, menunjukkan komitmen sub nasional dan penyerapan ide-ide yang terfragmentasi dalam menerapkan langkah-langkah mitigasi seperti jarak sosial, pembatasan perjalanan, dan pengujian virus (Evans & Steven, 2020).

### **Sistem Politik di Korea Selatan**

Dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah Korea Selatan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan mengeluarkan undang-undang baru tentang penggunaan teknologi informasi untuk mengumpulkan data telekomunikasi warga dari jarak jauh yang dapat melacak potensi kasus COVID-19 pada individu. Kementerian Kesehatan juga mewajibkan penyedia layanan kesehatan untuk menyampaikan

informasi tentang pasien yang berpotensi terinfeksi. Warga diberikan hak untuk menjalani tes penyakit baru dengan biaya ditanggung pemerintah (Stasavage, 2020). Menurut GHK dari Sungkyunkwan University Korea Selatan: “Keberhasilan Korea Selatan dalam menangani COVID-19 dapat dilihat melalui kontrol ketat terhadap efeknya dengan mempelajari kasus SARS pada tahun 2003 dan MERS 2015. Selain itu, ada dukungan publik, misalnya, untuk 3.000 peserta medis yang secara sukarela terlibat dalam penanganan COVID-19. Pemerintah Korea Selatan sendiri terbilang cekatan dalam segera menyediakan infrastruktur kesehatan yang memadai, termasuk alat tes COVID-19 yang inovatif lengkap dengan data yang tersaji rapi. Terakhir, pemerintah juga memberikan pelayanan jaminan kesehatan yang komprehensif namun murah bagi warganya” (GHK, Guru Besar Sungkyunkwan University, Korea Selatan dalam Webinar Internasional “Masalah Pemerintahan dan Administrasi Publik di Tengah Pandemi COVID-19: Pengalaman Negara dan Imperatif Kerjasama Regional, Kamis, 7 Mei 2020).”

Seperti yang disampaikan GKH, pemerintah Korea Selatan cukup gesit dalam menyediakan infrastruktur kesehatan yang memadai, menjamin pelayanan kesehatan yang komprehensif namun murah, serta menyediakan alat tes COVID-19 yang inovatif dan lengkap dengan data yang rapi. Pemerintah Korea Selatan juga sangat fokus pada strategi penanggulangan epidemi berbasis IT yang meliputi dokumentasi, pemodelan, dan pelacakan kontak, untuk mengidentifikasi sumber infeksi yang beredar di masyarakat. Fokusnya adalah melacak individu yang terinfeksi dan siapa saja yang telah melakukan kontak dengan mereka (Y. Park et al., 2020).

Kendala utama penerapan pelacakan kontak ini adalah Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi (PIPA) tahun 2011, yang melarang pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi tanpa persetujuan dari individu yang memilikinya (Sangchul Park et al., 2020). Untuk mengatasinya, pemerintah memberikan kewenangan kepada Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan (MOH), Lembaga Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (CD PCA); dan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KCDC) untuk

mengabaikan ketentuan khusus PIPA. Lembaga-lembaga ini diizinkan mengumpulkan, membuat profil, dan berbagi kategori data yang berkaitan dengan individu yang terinfeksi atau diduga terinfeksi. Sedangkan data khusus yang dikumpulkan meliputi data lokasi, informasi identitas diri, rekam medis dan resep, catatan keimigrasian, data transaksi kartu kredit, kartu debit, kartu prabayar, catatan pas transit angkutan umum, dan rekaman closed circuit television (CCTV). KCDC diperbolehkan untuk berbagi data dengan pemerintah nasional, kota (lokal), lembaga asuransi kesehatan nasional, dan profesional perawatan kesehatan dan asosiasi mereka. KCDC juga dapat mengirim data dengan cepat ke penyelidik epidemiologi (Shi et al., 2021).

Kementerian Kesehatan akan menggunakan data tersebut untuk memilah tingkat keparahan pasien dan menentukan rute dan sarana transportasi bagi mereka yang terinfeksi, institusi medis yang harus merawat mereka, dan status kesehatan orang-orang yang terkait dengan mereka. Beberapa pemerintah kota bahkan menggunakan data tersebut untuk menentukan rute yang sangat rinci, nama restoran, nama toko, dan tempat bisnis lain yang boleh dikunjungi oleh penduduk yang terinfeksi. Ahli epidemiologi juga mengaku sangat terbantu dengan menggunakan sistem TI terintegrasi yang menghemat sumber daya dan dapat mengotomatiskan seluruh proses pelacakan (D. Lee & Lee, 2020).

## SEJARAH MENGHADAPI PANDEMI

### Sejarah Indonesia Menghadapi Pandemi

Indonesia selama ini abai dengan beberapa wabah yang terjadi di masa lalu, yang menyebabkan banyak korban meninggal dunia. Pada tahun 1911, lebih dari 60.000 orang meninggal karena wabah kolera (Simanjuntak et al., 2001). Epidemio lain yang juga menewaskan banyak orang di Indonesia adalah Malaria, yang merupakan salah satu dari sepuluh penyakit paling mematikan di dunia saat itu, dengan jumlah kematian hampir setengah juta orang. (Sipe & Dale, 2003). Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit berikutnya yang melanda Indonesia dan menempati urutan kedua di dunia. Menurut data World Health

Organization (WHO), jumlah kematian akibat tuberkulosis di Indonesia mencapai 300 orang per hari (Simamora, 2017).

Indonesia<sup>48</sup> mengumumkan kasus COVID-19 pertamanya pada Maret 2020. Sejak itu, para ilmuwan yang menangani kasus COVID-19 di Indonesia menilai banyak kekurangan (Rochmyaningsih, 2020) karena pengumuman kasus pertama oleh Indonesia dikatakan terlambat. Setelah informasi tersebut, terjadi lonjakan jumlah warga yang terkonfirmasi positif Covid-19. Kelambanan pemerintah Indonesia dalam menanggapi COVID-19 diperparah dengan minimnya metode ilmiah dalam menangani kasus tersebut. Melalui beberapa pejabat di pemerintah pusat, pemerintah Indonesia dengan bercanda mengklaim bahwa masyarakat kebal terhadap COVID-19.<sup>65</sup> Meski Universitas Harvard telah memperingatkan dan menyarankan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang sangat rentan terhadap penularan COVID-19, Kementerian Kesehatan RI membantah fakta tersebut. Selain itu, berbagai media internasional dan lembaga kesehatan asing juga menyoroti kemampuan pemerintah dan ilmuwan Indonesia yang dianggap tidak ahli dalam mendeteksi dan mendiagnosis gejala dan penyebaran COVID-19 (Olivia et al., 2020).

### Sejarah Amerika Serikat Menghadapi Pandemi

Pada tahun 1918, Amerika Serikat mengidentifikasi pandemi influenza (H1N1). Pandemi ini, juga disebut flu Spanyol, diklaim sebagai yang paling parah di seluruh dunia, karena jumlah kematian diperkirakan setidaknya 50 juta di seluruh dunia (Jester et al., 2019). Di Amerika Serikat saja, jumlah korban tewas selama penyebaran mencapai 675.000. Bertahun-tahun kemudian pada tahun 2009, virus H1N1 baru muncul dan menginfeksi Amerika Selatan, mengakibatkan ratusan kematian (Goñi et al., 2012). Wabah lain di Amerika adalah demam berdarah, yang pertama kali diidentifikasi pada tahun 1960 di Amerika Selatan dan Amerika Tengah dan berlangsung hingga tahun 1980 (Morse, 2007). Kasus demam berdarah di Amerika Serikat mencapai 344.203 dan jumlah kematian 150 juta di seluruh dunia (Pinheiro & Nelson, 1997).

Saat ini, COVID-19 juga telah bergabung dengan sejarah pandemi Amerika Serikat karena menyebar dengan cepat secara nasional. Sejak kematian pertama dari kasus COVID-19 dikonfirmasi, tingkat penyebaran di berbagai wilayah dan negara bagian di Amerika Serikat meningkat, sementara jumlah kematian tidak dapat dicatat dengan cepat. Selama tahun 2020, Amerika Serikat masih berada di peringkat tertinggi di dunia untuk COVID-19 (Tian et al., 2021).

### **Sejarah Korea Selatan Menghadapi Pandemi**

Pada tahun 2015 Korea Selatan menghadapi pandemi virus MERS (Middle East Respiratory Syndrome). Kasus pandemi MERS yang terjadi, dibawa oleh warga yang melakukan perjalanan dari Timur Tengah. Virus MERS sudah menyebar di Timur Tengah beberapa tahun sebelum masuk ke Korea Selatan. Akibat insiden ini, puluhan warga Korea Selatan tewas. Pemerintah Korea Selatan mengkarantina 3.680 orang dan menutup 2.900 sekolah (Cowling et al., 2015). Menanggapi kritik ini dan 38 kematian yang disebabkan oleh MERS, Korea Selatan mengubah Undang-Undang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular untuk memperluas wewenang Menteri Kesehatan selama wabah dan memastikan hak warga negara untuk mengetahui jalur infeksi virus. Sejak 2015, Pusat Pengendalian Penyakit Korea Selatan (KCDC) juga terus meningkatkan staf dan pelatihan epidemiologinya dengan membentuk divisi khusus untuk penilaian risiko, operasi darurat, komunikasi krisis, dan koordinasi mitra (globalpolicyjournal.com, 2020).

Pada tahun 2003, Korea Selatan juga memiliki pengalaman menangani virus SARS yang sebelumnya menyebar di China. Virus ini juga telah melanda beberapa negara di dunia. Korea Selatan pernah mengalami virus SARS selama enam bulan (S. S. Kim et al., 2005). Meski berdampak pada faktor ekonomi di Korea Selatan, namun kematian akibat virus SARS berhasil diminimalisir oleh Pemerintah Korea Selatan. (K.-M. Lee & Jung, 2019).

Kegagalan selama wabah MERS pada tahun 2015 membuat Korea Selatan membangun infrastruktur respons kesehatan dengan secara cepat memperluas kapasitas pengujian tingkat tinggi pada minggu-



minggu pertama epidemi COVID-19 pada tahun 2020. Dalam dua minggu, ribuan alat uji tersedia. Pada 29 Februari, jumlah kasus baru yang dikonfirmasi memuncak pada 909. Tetapi hanya dalam enam hari, jumlah ini berkurang setengahnya menjadi 438 pasien pada 5 Maret. Pada 9 Maret, ini semakin berkurang menjadi 248 kasus. Pada 12 Maret, Korea Selatan menguji 20.000 orang per hari, yang merupakan tingkat pengujian per kapita tertinggi secara global. Jumlah ini juga terus menurun, seiring dengan jumlah kasus dan terduga (S. S. Kim et al., 2005).

## RESPON PEMERINTAH

### Respon Pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia tidak menerapkan undang-undang karantina yang ada. Presiden Joko Widodo malah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Peraturan Pemerintah menyebutkan defisit anggaran negara dapat mencapai lebih dari 3% dari produk domestik bruto. Peraturan Pemerintah ini juga melindungi penyelenggara program COVID-19 dari tuntutan pidana, dan mengambil alih peran legislatif dalam fungsi anggaran (Thejakartapost.com, 2020).

Hal ini dianggap sebagai keputusan dan tindakan yang dapat merusak nilai-nilai demokrasi, dan menjadi tanda bahwa Indonesia sedang memasuki penyimpangan demokrasi. Menurut AA, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah. "Penerapan demokrasi di Indonesia tidak mengarah pada demokrasi yang baik, apalagi di masa pandemi. Peraturan pemerintah mengambil alih fungsi anggaran yang menjadi hak DPR RI. Namun DPR RI juga setuju dengan hal tersebut. *"Mengabaikan peradilan, dengan menaikkan biaya jaminan kesehatan, meskipun Mahkamah Agung telah membatalkan keputusan presiden tentang kenaikan itu, sekarang sedang diangkat kembali. Peningkatan ini sangat merugikan banyak orang kecil. Kebijakan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, justru berbahaya, dapat memudahkan pandemi COVID-19, dan penanganannya*

*akan berlarut-larut. Kebijakan yang saling berbenturan saling bertentangan dan saling bertentangan. Tidak sejalan dengan apa yang diperjuangkan tenaga medis.”* (AA, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah dalam Kajian Online I-OTDA tentang Kepemimpinan Pemerintah dalam Memerangi Pandemi Covid-19. Diakses pada Selasa, 19 Mei 2020).

### **Respon Pemerintah Amerika Serikat**

Pemerintah Amerika Serikat belum memberlakukan undang-undang baru terkait pandemi COVID-19. Sebaliknya, mereka terus menetapkan berbagai aturan dan kebijakan untuk menghadapinya. Di antara kebijakan yang dibuat adalah tidak memberlakukan lockdown, dengan alasan buruk bagi perekonomian Amerika. Meski begitu, Trump melarang warga Amerika untuk bepergian ke China dan Eropa, termasuk negara lain yang terpapar COVID-19. Trump kemudian sibuk mempolitisasi masalah pandemi COVID-19 (Balogun, 2020). Biden, yang menggantikan Trump, kemudian memperluas kebijakan penggunaan masker di tempat umum. Pandemi COVID-19 telah menciptakan krisis yang menentang pemerintah pusat dan daerah untuk berinovasi dalam menanggapi masalah baru yang diperkuat oleh hambatan struktural dan kesenjangan sosial (Badger & Michel, 2020).

Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan Amerika terkait undang-undang dan peraturan Negara yang harus dibuat dan dijalankan dalam menghadapi COVID-19. Kesulitan utama dalam mencapai hal ini adalah sentralitas pemerintah federal dan kebiasaan mencirikan pemerintah daerah sebagai non-profesional. Di sisi lain, tradisi sentralis dan ketidakseimbangan sumber daya dan informasi membuat pejabat daerah sulit mempercayai perilaku pejabat nasional. Contoh dari kurangnya kepercayaan ini adalah kenyataan bahwa banyak pemerintah subnasional memiliki aturan dan tindakan yang lebih ketat daripada pemerintah nasional, yang memberikan contoh praktik yang dapat meningkatkan kepercayaan antar tingkat pemerintahan dengan mengubah pengaturan kelembagaan dan juga memberikan lebih banyak kekuatan kepada otoritas lokal (Cruz et al., 2020).

## Respon Pemerintah Korea Selatan

Sejak kasus pertama dilaporkan terjadi di Korea Selatan pada Januari 2020, komite pelayanan kesehatan segera merekomendasikan penguatan kontrol perbatasan dan protokol desinfeksi (Her, 2020a). Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea juga menyerukan untuk menghindari pertemuan kelompok pribadi, olahraga dalam ruangan, mengadakan perjamuan, dan pertemuan lainnya di tempat kerja (S. Y. Park et al., 2020). Kebijakan lainnya adalah menentukan lokasi perawatan untuk setiap pasien menggunakan sistem triase dan mengharuskan semua kasus yang dikonfirmasi untuk tinggal di area yang ditentukan di bawah pengawasan. Aturan selanjutnya yang ditetapkan oleh pemerintah & tenaga kesehatan adalah pembentukan 600 situs skrining COVID-19, klinik kesehatan masyarakat, pusat drive-through, dan situs skrining online, skrining drive-through (Her, 2020b).

Aplikasi kuesioner skrining COVID-19, penyediaan dan pendistribusian alat pelindung diri, dan penggunaan Global Positioning System (GPS). Strategi penahanan epidemi berbasis TI mencakup dokumentasi, pemodelan, dan pelacakan kontak. Upaya pemodelan dilakukan untuk menemukan sumber potensial infeksi yang didapat dari masyarakat. Fokusnya adalah melacak individu yang terinfeksi dan siapa saja yang telah melakukan kontak dengan mereka (You, 2020). Untuk mempercepat ini, pemerintah bekerja sama dengan Institute for Prevention and Control of Infectious Diseases (CD PCA), Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KCDC) mengumpulkan, membuat profil, dan berbagi kategori data, berkaitan dengan individu yang terinfeksi atau dicurigai terinfeksi (Sangchul Park et al., 2020).

Berkat penerapan aturan dan kebijakan ini, lebih dari 15.000 tes skrining dapat dilakukan dalam satu hari. Pergerakan pasien untuk mencegah penularan lebih lanjut dapat dengan mudah diidentifikasi, dan sosialisasi peta pergerakan kepada penduduk untuk melakukan tindakan pencegahan tambahan dilakukan dengan baik. Demikian juga kewajiban menggunakan masker dan menjaga jarak fisik lebih dari 2 meter untuk menghindari penularan melalui kontak langsung, droplet pernapasan,

dan partikel virus aerosol juga semakin diperkuat (Jin et al., 2020). Untuk tingkat yang lebih besar, karena kehidupan rutin dan kondisi ekonomi juga berpengaruh, para profesional kesehatan menuntut metode kontrol perbatasan yang ketat, penguncian, larangan rapat, larangan ekspor peralatan pelindung pribadi, dan tindakan pengendalian infeksi lainnya secara ketat (He et al., 2020). Di Korea Selatan, transparansi pemerintah dan KCDC telah berhasil meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat efektivitas penanganan pandemi di Korea Selatan (Choi, 2020).

## **BIAYA MELAWAN COVID-19**

### **Biaya Melawan Covid-19 di Indonesia**

Penyusunan anggaran belanja negara menjadi bagian penting dalam menghadapi pandemi COVID-19. Penanganan COVID-19 membutuhkan biaya yang tinggi dan membutuhkan dana yang besar untuk mengatasinya. Pemerintah di berbagai negara demokrasi memiliki kebijakan yang berbeda dalam menganggarkan dana untuk pandemi COVID-19. Indonesia pada 2020 menganggarkan Rp 578 triliun untuk menghadapi pandemi COVID-19. Dana tersebut disalurkan untuk berbagai sektor, seperti ekonomi, masyarakat, kesehatan, dan lain-lain. Namun, dari jumlah tersebut, sektor kesehatan mendapat anggaran paling kecil, yakni hanya 70 triliun rupiah. Ketika anggaran kesehatan harus dinaikkan, pemerintah justru menaikkan iuran jaminan kesehatan bagi rakyatnya. Dalam penanganan COVID-19, pemerintah Indonesia telah menaikkan biaya jaminan kesehatan yang dikenal dengan nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sedangkan sektor lain seperti perempuan mendapat porsi yang cukup besar, seperti sektor bantuan sosial (Agustino, 2020).

### **Biaya Menghadapi Covid-19 di Amerika Serikat**

Pada tahun 2020, pemerintah Amerika Serikat menganggarkan \$8,3 miliar untuk menangani pandemi COVID-19. Dana tersebut tersedia pada bulan Maret dan dialokasikan ke fasilitas Departemen Luar Negeri untuk mengevakuasi kedutaan AS di negara-negara yang mengalami

pandemi COVID-19 untuk pasokan medis, penelitian, dan pengujian vaksin. Vaksin ini kemudian menerima tambahan \$105 miliar dalam kredit pajak baru-baru ini karena dampak COVID-19 dan \$192 miliar untuk menutupi defisit anggaran federal hingga 2030 (Congressional Budget Office, 2020). Tingkat kesehatan publik negara bagian dan lokal sangat bervariasi di seluruh Amerika Serikat, tetapi kesenjangan pendanaan yang terus-menerus juga tetap ada (Humphries et al., 2020). RUU stimulus virus corona ketiga yang baru-baru ini ditandatangani oleh Presiden memimpin Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) untuk menyediakan \$ 4,3 miliar kepada organisasi kesehatan masyarakat lokal, negara bagian, dan federal untuk meningkatkan upaya kesiapsiagaan, pencegahan, dan respons terhadap COVID-19 (Maani & Galea, 2020).

Banyak rumah sakit mengalami lonjakan pasien sakit kritis dengan krisis keuangan yang buruk (Fried et al., 2020). Situasi ini telah menciptakan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama untuk rumah sakit pedesaan. Dari 4663 rumah sakit untuk perawatan penyakit akut di AS, sekitar 47% berlokasi di daerah pedesaan di 49 negara bagian (Millett et al., 2020). Untuk itu, lembaga seperti Federal Recovery, Coronavirus Aid Relief dan Economic Security Act, dan Program Perlindungan Gaji telah memberikan bantuan jangka pendek ke rumah sakit pedesaan. Medicare dan beberapa pihak swasta lainnya juga telah menawarkan bantuan sementara (Khullar et al., 2020).

### **Biaya Menghadapi Covid-19 di Korea Selatan**

Pemerintah Korea Selatan menerapkan anggaran tambahan yang fokus pada penanganan krisis. Undang-undang Keuangan Nasional diberlakukan untuk menentukan kondisi anggaran tambahan. Pasal 89 UU tersebut menyatakan bahwa pemerintah dapat merumuskan rancangan anggaran tambahan dalam salah satu peristiwa seperti perang atau bencana skala besar, perubahan signifikan seperti resesi ekonomi, pengangguran massal, dan perubahan hubungan antara-Korea (Utara dan Selatan). Pemerintah Korea Selatan juga telah menyediakan dana maksimal untuk menangani pandemi COVID-19. Pada Februari-

Maret 2020, pemerintah Korea menganggarkan 2,1 miliar euro untuk bantuan bagi usaha kecil dan menengah yang terkena dampak Covid-19. Pemerintah kemudian menambahkan lagi USD 39 miliar sebagai pinjaman untuk usaha kecil dan sebagai bantuan darurat bagi warganya (B. H. Kim, 2020).

Rincian anggaran tambahan tersebut adalah sebagai berikut: 4,1 triliun KRW (3,5 miliar USD) untuk mendukung usaha mikro dan kecil-menengah; 3,5 triliun KRW (3,0 miliar USD) untuk menstabilkan pekerjaan dan mata pencaharian individu; 2,1 triliun KRW (1,8 miliar USD) untuk memperkuat sistem karantina dan pengendalian penyakit; 1,2 triliun KRW (1,0 miliar USD) untuk merevitalisasi ekonomi dan bisnis lokal; dan 1,7 triliun KRW (1,5 miliar USD) untuk membantu Daegu dan provinsi tetangganya. Setelah anggaran tambahan pertama yang bersejarah dimaksudkan, untuk membiayai program bantuan darurat rumah tangga hingga KRW 1 juta per rumah tangga. Sebanyak 14,3 triliun KRW, yang termasuk dana pemerintah daerah sebesar 1,2 triliun KRW, akan digunakan untuk program bantuan (Sungho Park & Maher, 2020).

Dalam menghadapi pandemi covid-19, reaksi publik dan pemerintah yang berkuasa menjadi faktor penentu bagi gagalnya penanganan Covid-19. Respon yang lambat dan sikap remeh terhadap hal ini menjadi masalah dan tantangan utama dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Indonesia mengumumkan kasus pertama Covid-19 pada Maret 2020. Sejak saat itu, oleh para ilmuwan penanganan kasus Covid-19 di Indonesia dinilai banyak kekurangannya (Rochmyaningsih, 2020), karena pengumuman kasus pertama oleh Indonesia dapat dikatakan sudah terlambat. Pasalnya, setelah hal tersebut diinformasikan justru terjadi lonjakan pada jumlah warga yang positif mengidap Covid-19. Hal yang sama juga terjadi di beberapa Negara lainnya. Mietzner (2020) melihat awalnya di Amerika Serikat, Donald Trump menilai ancaman Covid-19 tidak terlalu mengkhawatirkan sehingga pemerintah tidak mengambil langkah serius.

Kelambanan pemerintah Indonesia dalam merespons COVID-19 juga diperparah dengan minimnya metode ilmiah dalam menangani

kasus COVID-19. Djalante et al., (2020) berdalih bahwa pemerintah Indonesia melalui beberapa pejabat di pemerintah pusat secara bercanda menganggap masyarakat kebal terhadap COVID-19. Meskipun Universitas Harvard telah memperingatkan dan menyarankan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang sangat rentan terhadap infeksi, tetapi Kementerian Kesehatan Indonesia membantah fakta ini. Selain itu, berbagai media internasional dan lembaga kesehatan asing juga menyoroti minimnya kemampuan ilmuwan Indonesia dalam mendeteksi dan mendiagnosis COVID-19 di kalangan warga.

Tak jauh berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat juga memiliki pengalaman yang relatif lambat dalam menangani pandemi. Mengenai hal ini, Yong (2020) menuturkan bahwa Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang belum siap menghadapi pandemi Covid-19, walaupun sebelumnya sudah ada wabah lainnya seperti SARS, MERS, Ebola, Zika, dan flu H1N1 (Yong, 2020). Pernyataan Yong ini berlebihan jika melihat pengalaman sejarah Amerika Serikat saat terjangkit wabah cacar yang terjadi di masa lalu (Patterson & Runge, 2002). Cacar jangka panjang ini membunuh jutaan orang Amerika (Behbehani, 1983). Selain cacar, penyakit pandemik yang pernah terjadi di Amerika dan membunuh banyak warganya adalah campak. Pada tahun 1962, warga Amerika yang berusia 15 tahun sebanyak 90%nya terkena campak (Orenstain et al., 2004). Influenza juga pernah menjadi wabah pada tahun 1914-1918 dan membunuh jutaan warga Amerika (Potter, 2001). Wabah lain di Amerika yang menyebabkan kematian cukup banyak adalah pes.

Pandemi COVID-19 dan respons Amerika Serikat terhadapnya melahirkan banyak kepentingan dan berbagai dampak. Karena pengaturan kelembagaan yang lemah, infrastruktur perawatan kesehatan Amerika Serikat tidak memiliki kapasitas untuk menahan peningkatan jumlah pasien COVID-19 (Barbaro, 2020). Tingkat infeksi meningkat, tetapi kebutuhan untuk menghemat biaya dan peraturan sangat membatasi ketersediaan peralatan medis secara nasional (Simonite, 2020). Alih-alih berkomitmen sungguh-sungguh untuk membendung COVID-19, pemerintah justru menghindarinya dengan memposisikan masalah ini sebagai masalah asing “virus China” (Vazquez & Klein, 2020).

Tanpa disadari, COVID-19 yang dipolitisasi sebagai masalah asing telah menciptakan rasa krisis bersama di semua tingkat subnasional. Ada tambal sulam kebijakan mulai dari jarak sosial sukarela hingga perintah wajib tinggal di rumah yang tidak disetujui semua negara bagian. Inkonsistensi institusional semacam ini mengundang kebijakan yang lemah di satu bidang mengancam kebijakan yang lebih kuat. Bahkan tindakan ketat seperti tindakan hukuman untuk ketidakpatuhan secara institusional lemah dan bergantung pada tekanan sosial normatif untuk mendorong kepatuhan (Strauss, 2020).

Trump menilai dampak pandemi Covid-19 tidak terlalu signifikan (Beer, 2020) dan menjadikannya sebagai bahan candaan di depan publik. Trump juga tampak tidak simpatik ketika kepada warga Amerika menjadi korban Covid-19. Penggunaan masker hanya dianggap sebagai tindakan sukarela. Pejabat Amerika Serikat dinilai tidak serius dalam menghadapi ancaman Covid-19. Begitu pula dengan pemerintah federal yang dinilai gagal melindungi warga dari masalah kesehatan dan memberikan kesejahteraan bagi warganya (Fitzpatrick, 2020). Oleh sebab itu, Amerika dikatakan telah kalah dalam perang melawan pandemi Covid-19.

Kegagalan selama wabah MERS pada tahun 2015 membuat Korea Selatan membangun infrastruktur respons kesehatan dengan secara cepat memperluas kapasitas pengujian tingkat tinggi pada minggu-minggu pertama epidemi COVID-19 pada tahun 2020. Dalam dua minggu, ribuan alat uji tersedia. Pada 29 Februari, jumlah kasus baru yang dikonfirmasi memuncak pada 909. Tetapi hanya dalam enam hari, jumlah ini berkurang setengahnya menjadi 438 pasien pada 5 Maret. Pada 9 Maret 2021 semakin berkurang menjadi 248 kasus. Pada 12 Maret, Korea Selatan menguji 20.000 orang per hari, yang merupakan tingkat pengujian per kapita tertinggi secara global (globalpolicyjournal.com, 2020).

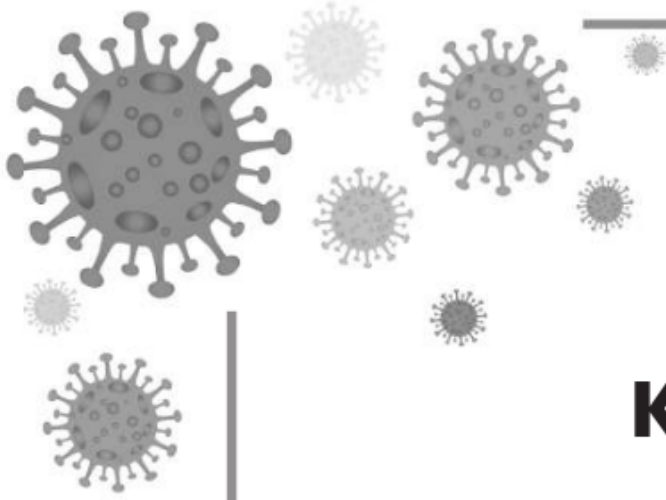
Salah satu tindakan kesehatan diaktifkan di rumah sakit tersier untuk mengisolasi pasien dan mengobati kasus parah yang dikonfirmasi. Salah satu rumah sakit tersier ini adalah Gil Medical Center (GMC), yang terletak di Incheon (Shi, 2020). Di rumah sakit ini, para ahli medis dan perawat sangat memperhatikan kelengkapan fasilitas pelayanan,



seperti ruang isolasi dengan sepuluh ruangan tekanan negatif; Pusat Triase dan Klinik Keselamatan Pernapasan; Stasiun Kontrol Pintu Masuk; Pemantauan HCW dan Pembatasan Kerja; Pemantauan Tenaga Kesehatan dan Pembatasan Kerja (Liu, 2020). Update harian zona bahaya menurut laporan situasi dari WHO; dan memproduksi banyak alat pelindung diri. Rumah sakit tersier di Korea memainkan peran penting dalam menangani epidemi COVID-19 (Lake, 2020). Mereka juga sering diperiksa untuk menghindari paparan ke rumah sakit. Namun, perlindungan rumah sakit membutuhkan beberapa strategi yang harus dilakukan secara bersamaan, dan Korea Selatan telah menunjukkan keuletan dan pengalamannya dalam mengendalikan epidemi COVID-19 berdasarkan tingkat penularan di negara tersebut (Lee, 2020).

Dalam kaitan ini, struktur kelembagaan, sejarah dan budaya nasional, undang-undang negara, dan anggaran belanja negara pemerintah Korea Selatan saling mendukung dalam menghadapi situasi ini. Dengan demikian, wajar jika penanganan COVID-19 di Korea Selatan berhasil menurunkan jumlah penderita COVID-19 baik bagi warga negara Korea Selatan maupun pendatang. Saat pandemi melanda, pemerintah Korea Selatan merespons dengan sangat cepat. Hal ini terlihat dari bagaimana pemerintah menangani pandemi ini di masa-masa awal penyebarannya.

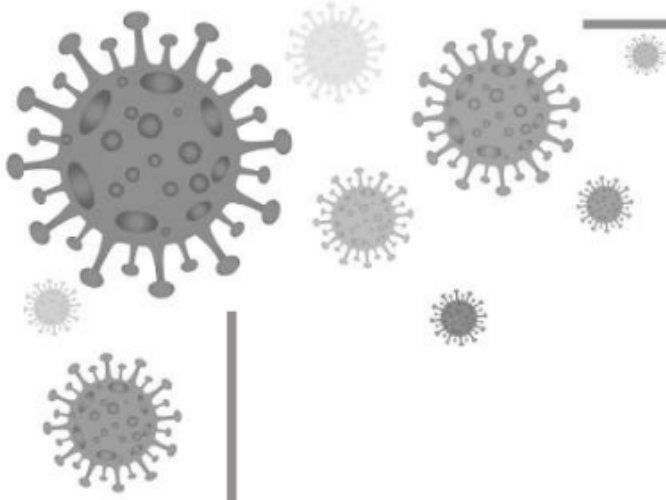




## KESIMPULAN

NEGARA-negara demokrasi memiliki tantangan tersendiri dalam menghadapi pandemi covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Amerika Serikat tidak mampu menjawab tantangan ini dengan baik. Keduanya lambat dalam menanggapi situasi hingga kritis. Sementara itu, negara demokrasi lain seperti Korea Selatan mampu menangani pandemi dengan cepat dan berhasil menahan penyebarannya. Demokrasi dengan kepemimpinan yang solid dan responsif serta integrasi antara lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, persatuan sejarah dan budaya nasional, peraturan perundang-undangan negara, dan anggaran negara untuk menangani wabah dan dukungan partisipasi masyarakat dapat mengatasi covid-19. Kombinasi ini menjadi kunci sukses, seperti yang terjadi di Korea Selatan. Sebaliknya, demokrasi dengan kepemimpinan yang lemah dan tidak responsif, serta kurangnya integrasi dalam penerapan faktor-faktor tersebut di atas, bisa menjadi penyebab kegagalan penanganan pandemi covid-19 seperti di dua negara lainnya, Indonesia dan Amerika Serikat.





## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2020). <sup>88</sup> *Sebaran maut COVID-19 dua seminar di Bogor: Pemda sigap pusat gagap*. Tirto.Id.
- Agustino, L. (2020). Analysis of covid-19 outbreak handling policy: the experience of indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 253–270. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.685>
- <sup>128</sup> Al-Tawfiq, J. A., & Memish, Z. A. (2019). The Hajj 2019 vaccine requirements and possible new challenges. *Journal of Epidemiology and Global Health*, 9(3), 147–152. <https://doi.org/10.2991/jegh.k.190705.001>
- Allen, B. (1998). Alexis de Tocqueville on the covenantal tradition of American federal democracy. *Publius*, 28(2), 1–23. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.pubjof.a029960>
- Almeida, M. V., & Oliveira, <sup>1</sup> B. S. J. de M. (2020). *united* states administrative state and covid-19: context and perspectives. *Rei - Revista Estudos Institucionais*, 6(3), 878–903. <https://doi.org/10.21783/rei.v6i3.567>

Avalokitesvari, N. N. A. N. (2018). Analisis Realisme terhadap Respon Korea Utara dalam Perang Saudara 1950-1953. In M. Halkis (Ed.), *Kapita Selekta: Filsafat dan Teori-teori Diplomasi Pertahanan* (pp. 167–190). Universitas Pertahanan.

46 Badger, D., & Michel, N. J. (2020). Mask Mandates: Do They Work? Are There Better Ways to Control COVID-19 Outbreaks? In *The Heritage* (Issue 3578, pp. 1–17). <http://report.heritage.org/bg3578>

19 Balogun, J. A. (2020). Lessons from the USA delayed response to the COVID-19 pandemic. *African Journal of Reproductive Health*, 24(1), 14–21. <https://doi.org/10.29063/ajrh2020/v24i1.2>

57 Baume, S. (2009). On political theology: A controversy between Hans Kelsen and Carl Schmitt. *History of European Ideas*, 35, 369–381. <https://doi.org/10.1016/j.histeuroideas.2009.01.001>

16 Bishry, A. D. (2019). Komunikasi Antar Budaya Demokrasi Amerika Serikat Versus Komunikasi Antar Budaya Demokrasi Indonesia. *Menara Ilmu*, XIII(7), 10–19. <http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/1494>

114 Bosman, J., & Donald, G. M. (2021). *U.S. Coronavirus Cases Are Falling, but Variants Could Erase Progress*. <https://www.nytimes.com/2021/01/22/us/covid-cases-decline.html>

81 Bowling, C. J., Fisk, J. M., & Morris, J. C. (2020). Seeking Patterns in Chaos: Transactional Federalism in the Trump Administration's Response to the COVID-19 Pandemic. *American Review of Public Administration*, 50(6–7), 512–518. <https://doi.org/10.1177/0275074020941686>

1 Bramasta, D. B. (2020). *Investigating the Duties and Functions of the Task Force for the Acceleration of Handling Covid-19, which Jokowi Disbanded*. Kompas.com. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/22/124500765/menyelisik-tugas-dan-fungsi-gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19-yang?page=all>

75 Brown, K. (1980). Thomas Hobbes and the Title-page of *Leviathan*. *Philosophy*, 55(213), 410–411. <https://doi.org/10.1017/S0031819100049330>

- 93  
Carter, D. P., & May, P. J. (2020). Making sense of the U.S. COVID-19 pandemic response: A policy regime perspective. *Administrative Theory and Praxis*, 42(2), 265–277. <https://doi.org/10.1080/10841806.2020.1758991>
- 62  
Choi, Y. J. (2020). The Power of Collaborative Governance: The Case of South Korea Responding to COVID-19 Pandemic. *World Medical and Health Policy*, 12(4), 430–442. <https://doi.org/10.1002/wmh3.376>
- 115  
Ciotti, M., Ciccozzi, M., Terrinoni, A., Jiang, W. C., Wang, C. Bin, & Bernardini, S. (2020). The COVID-19 pandemic. *Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences*, 0(0), 365–388. <https://doi.org/10.1080/10408363.2020.1783198>
- 119  
Congressional Budget Office. (2020). *An Update to the Budget and Economic Outlook 2020-2030* (Issue September). [www.cbo.gov/publication/56517](http://www.cbo.gov/publication/56517)
- 104  
Cotton, J. (1989). From Authoritarianism to Democracy in South Korea. *Political Studies*, 37, 244–259. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1989.tb01481.x>
- 14  
Cowling, B. J., Park, M., Fang, V. J., Wu, P., Leung, G. M., & Wu, J. T. (2015). Preliminary epidemiological assessment of MERS-CoV outbreak in South Korea, may to june 2015. *Eurosurveillance*, 20(25), 1–7. <https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES2015.20.25.21163>
- 126  
Cruz, E. E. R. de la, Grin, E. J., Sanabria-Pulido, P., Cravacuore, D., & Orellana, A. (2020). The Transaction Costs of Government Responses to the COVID-19 Emergency in Latin America. *Public Administration Review*, 80(4), 683–695. <https://doi.org/10.1111/puar.13259>
- 56  
Dahl, R. A. (1967). The city in the future of democracy. *The American Political Science Review*, 56(4), 953–970. <https://doi.org/10.1017/S0003055400279021>
- 40  
Dahl, R. A. (1977). On Removing Certain Impediments to Democracy in the United States. *Political Science Quarterly*, 92(1), 1–20. <https://doi.org/10.2307/2148546>

- 52 Darini, R. (2010). Park Chung-Hee dan Keajaiban Ekonomi Korea Selatan. *Mozaik*, *V*(1), 21–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/moz.v5i1.4336>
- 33 Devi, S. (2020). Travel restrictions hampering COVID-19 response. *The Lancet*, *395*(10233), 1331–1332. [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(20\)30967-3](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(20)30967-3)
- 1 Digital.gov. (2020). *Coronavirus (COVID-19) Guidance for U.S. Government Websites and Social Media*. Digital.gov. <https://www.usa.gov/coronavirus>
- 90 Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., Mahfud, C., Sinapoy, M. S., Djalante, S., Rafliana, I., Gunawan, L. A., Surtiari, G. A. K., & Warsilah, H. (2020). Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Progress in Disaster Science*, *6*, 100091. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091>
- Ebrahim, S. H., & Memish, Z. A. (2020). COVID-19: preparing for superspreader potential among Umrah pilgrims to Saudi Arabia. *The Lancet*, *395*(10227), e48. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30466-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30466-9)
- 30 Elliott, J. E. (1994). Joseph A. Schumpeter and the theory of democracy. *Review of Social Economy*, *52*(4), 280–300. <https://doi.org/10.1080/758523325>
- 76 Evans, A., & Steven, D. (2020). Shooting the Rapids COVID-19 and the Long Crisis of Globalisation. *Scientific American*, 1–56. <https://doi.org/10.1038/scientificamerican0694-32>
- Fauzan. (2015). Pemikiran politik ibnu rusyd. *Kalam*, *9*(2), 347–372. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.336>
- Fauziah, F. (2019). Civic education di Negara Korea Selatan dan Inggris. *Foundasia*, *X*(2), 64–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/foundasia.v10i2.27926>
- 125 Fealy, G. (2020). Jokowi in the Covid-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and the Overbearing State. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *56*(3), 301–323. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1846482>



- 107 Fried, J. E., Liebers, D. T., & Roberts, E. T. (2020). Sustaining Rural Hospitals after COVID-19: The Case for Global Budgets. *JAMA - Journal of the American Medical Association*, 324(2), 137–138. <https://doi.org/10.1001/jama.2020.9744>
- 111 Goñi, N., Moratorio, G., Coppola, L., Ramas, V., Comas, V., Soñora, M., Chiparelli, H., & Cristina, J. (2012). Bayesian coalescent analysis of pandemic H1N1 influenza A virus circulating in the South American region. *Virus Research*, 170(1–2), 91–101. <https://doi.org/10.1016/j.virusres.2012.09.002>
- 92 Habermas, J. (2018). Interview with Jürgen Habermas. In *The Oxford Handbook of Deliberative Democracy* (Issue October, pp. 870–882). <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198747369.013.60>
- 36 Habermas, J., Lennox, S., & Lennox, F. (1974). The Public Sphere: An Encyclopedia Article (1964). *New German Critique*, 3, 49–55. <https://doi.org/10.4324/9780367809195-3>
- 44 Haliim, W. (2016). Demokrasi Deliberatif Indonesia : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 42(1), 19–30.
- 131 Halimatuzzahro. (2017). Filsafat politik ibnu rusyd. *Refleksi*, 17(1), 79–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ref.2017.%25x>
- 135 Haridison, A., Sandi, J. R. A., Suprayitno, & Jaya, I. (2020). Regional Election and Covid-19: Evidence in Central Kalimantan. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(2), 1597–1606. <https://doi.org/https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1821>
- 87 He, J., Chen, G., Jiang, Y., Jin, R., Shortridge, A., Agusti, S., He, M., Wu, J., Duarte, C. M., & Christakos, G. (2020). Comparative infection modeling and control of COVID-19 transmission patterns in China, South Korea, Italy and Iran. *Science of the Total Environment*, 747, 141447. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141447>
- 24 Hennida, C., Felayati, R. A., Wijayanti, S. H., & Perdana, A. R. (2016). Budaya dan Pembangunan Ekonomi di Jepang, Korea Selatan dan

- China. *Global & Strategis*, 10(2), 248–263. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/jgs.10.2.2016.248-263> 109
- Her, M. (2020a). How Is COVID-19 Affecting South Korea? What Is Our Current Strategy? *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, 14(5), 684–686. <https://doi.org/10.1017/dmp.2020.69> 7
- Her, M. (2020b). Repurposing and reshaping of hospitals during the COVID-19 outbreak in South Korea. *One Health*, 10(May), 100137. <https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2020.100137> 117
- Hidayat, T., & Azmi, K. (2018). Pembingkai berita dugaan kecurangan pilkada serentak 2017 DKI Jakarta di detik.com periode 18 Februari 2017” (analisis framing Robert N. Entman). *Pantarei*, 2(2), 1–10. 51 106
- Humphries, J. E., Neilson, C., & Ulysea, G. (2020). The Evolving Impacts of COVID-19 on Small Businesses Since the CARES Act. In *Ssrn* (Issue 2230). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3584745>
- Intan, G. (2020). *Jokowi Forms Integrated Team for Handling Covid-19 and Economic Recovery*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-bentuk-tim-terpadu-penanganan-covid-19-dan-pemulihan-ekonomi-/5510001.html> 1
- Jester, B., Uyeki, T. M., Jernigan, D. B., & Tumpey, T. M. (2019). Historical and clinical aspects of the 1918 H1N1 pandemic in the United States. *Virology*, 527(May 2018), 32–37. <https://doi.org/10.1016/j.virol.2018.10.019> 113
- Jin, Y. H., Cai, L., Cheng, Z. S., Cheng, H., Deng, T., Fan, Y. P., Fang, C., Huang, D., Huang, L. Q., Huang, Q., Han, Y., Hu, B., Hu, F., Li, B. H., Li, Y. R., Liang, K., Lin, L. K., Luo, L. S., Ma, J., ... Wang, X. H. (2020). A rapid advice guideline for the diagnosis and treatment of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) infected pneumonia (standard version). *Medical Journal of Chinese People's Liberation Army*, 45(1), 1–20. <https://doi.org/10.11855/j.issn.0577-7402.2020.01.01> 8
- Kalyvas, A. (2006). The basic norm and democracy in Hans Kelsen's legal and political theory. *Philosophy & Social Criticism*, 32(5), 573–599. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33635> 41

- 18 Kelsen, H. (1955). Foundations of Democracy. *Ethics and International Journal of Social, Political, and Legal Philosophy*, LXVI(1), 1–101.
- Kelsen, H. (2001). On the Essence and Value of Democracy. In A. Jacobson & B. Schlink (Ed.), *Weimar* (pp. 84–109). Berkeley: University of California Press. <https://doi.org/10.1525/9780520929685-011>
- 137 Khan, A. G., Kamruzzaman, M., Rahman, M. N., Mahmood, M., & Uddin, M. A. (2021). Quality of life in the COVID-19 outbreak: influence of psychological distress, government strategies, social distancing, and emotional recovery. *Heliyon*, 7(3), e06407. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06407>
- 10 Khullar, D., Bond, A. M., & Schpero, W. L. (2020). COVID-19 and the Financial Health of US Hospitals. *JAMA - Journal of the American Medical Association*, 323(21), 2127–2128. <https://doi.org/10.1001/jama.2020.6269>
- 108 Kim, B. H. (2020). Budgetary responses to COVID-19: the case of South Korea. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 32(5), 939–947. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-06-2020-0079>
- 89 Kim, S. S., Chun, H., & Lee, H. (2005). The effects of SARS on the Korean hotel industry and measures to overcome the crisis: A case study of six Korean five-star hotels. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 10(4), 369–377. <https://doi.org/10.1080/10941660500363694>
- 14 Ladavac, N. B. (1998). Hans Kelsen (1881-1973) Biographical Note and Bibliography. *European Journal of International Law*, 9, 391–400.
- 59 Landman, T., & Splendore, L. D. G. (2020). Pandemic democracy: elections and COVID-19. *Journal of Risk Research*, May, 1060–1066. <https://doi.org/10.1080/13669877.2020.1765003>
- 83 Lee, D., & Lee, J. (2020). Testing on the move: South Korea's rapid response to the COVID-19 pandemic. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, 5, 100111. <https://doi.org/10.1016/j.trip.2020.100111>

Lee, K.-M., & Jung, K. (2019). Factors influencing the response to infectious diseases: Focusing on the case of sars and mers in south korea. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(8). <https://doi.org/10.3390/ijerph16081432>

67 Lieberman, D. (2008). Bentham's democracy. *Oxford Journal of Legal Studies*, 28(3), 605–626. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqn014>

10 Maani, N., & Galea, S. (2020). COVID-19 and Underinvestment in the Public Health Infrastructure of the United States. *Milbank Quarterly*, 98(2), 250–259. <https://doi.org/10.1111/1468-0009.12463>

103 Mersel, Y. (2006). Hans kelsen and political parties. *Israel Law Review*, 39(2), 158–181. <https://doi.org/10.1017/S0021223700013054>

Mietzner, M. (2020). Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia's Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(2), 227–249. <https://doi.org/10.1177/1868103420935561>

96 Millett, G. A., Jones, A. T., Benkeser, D., Baral, S., Mercer, L., Beyrer, C., Honermann, B., Lankiewicz, E., Mena, L., Crowley, J. S., Sherwood, J., & Sullivan, P. S. (2020). Assessing differential impacts of COVID-19 on black communities. *Annals of Epidemiology*, 47, 37–44. <https://doi.org/10.1016/j.annepidem.2020.05.003>

23 Morens, D. M., Folkers, G. K., & Fauci, A. S. (2009). What is a pandemic? *Journal of Infectious Diseases*, 200(7), 1018–1021. <https://doi.org/10.1086/644537>

Morse, S. S. (2007). Pandemic influenza: Studying the lessons of history. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 104(18), 7313–7314. <https://doi.org/10.1073/pnas.0702659104>

Mutiarasari, N. N., & Herawati, R. (2020). Supervision of Bawaslu Pematang Regency in the 2020 Regional Head Election. *Law Reform*, 16(2), 264–275. <https://doi.org/10.14710/lr.v16i2.33777>

- 121  
Muttaqin, E. Z. (2020). Sistem Politik Dan Demokrasi Amerika. *Al Qisthas : Jurnal Hukum Dan Politik*, 10(2), 43–52. <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v10i2.2346>
- 32  
Norris, K., & Gonzalez, C. (2020). COVID-19, health disparities and the US election. *EClinicalMedicine*, 28, 19–20. <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100617>
- 1  
Nugraheny, D. E. (2021). *Tambah 14.518, Kini Ada 1.066.313 Kasus Covid-19 di Indonesia*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/30/16383131/update-30-januari-tambah-14518-kini-ada-1066313-kasus-covid-19-di-indonesia>
- Nursanik, & Mursidah, I. (2020). Kritik Nalar Pemikiran Politik Thomas Hobbes. *Al-Qisthas*, 11(2), 18–45.
- 9  
Oktaviani, R. A., & Mulyana, A. (2018). Perlawanan masyarakat korea selatan menuju gerbang demokrasi tahun 1980. *Factum*, 7(2), 227–240. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/factum.v7i2.15608>
- 21  
Olivia, S., Gibson, J., & Nasrudin, R. (2020). Indonesia in the Time of Covid-19. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 143–174. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1798581>
- 69  
Park, S. Y., Kim, Y. M., Yi, S., Lee, S., Na, B. J., Kim, C. B., Kim, J. Il, Kim, H. S., Kim, Y. B., Park, Y., Huh, I. S., Kim, H. K., Yoon, H. J., Jang, H., Kim, K., Chang, Y., Kim, I., Lee, H., Gwack, J., ... Jeong, E. K. (2020). Coronavirus disease outbreak in call center, South Korea. *Emerging Infectious Diseases*, 26(8), 1666–1670. <https://doi.org/10.3201/eid2608.201274>
- Park, Sangchul, Choi, G. J., & Ko, H. (2020). Information Technology–Based Tracing Strategy in Response to COVID-19 in South Korea–Privacy Controversies. *JAMA*, 21(323), 2129–2130. <https://doi.org/10.1001/jama.2020.6602>
- 62  
Park, Sungho, & Maher, C. S. (2020). Government Financial Management and the Coronavirus Pandemic: A Comparative Look at South Korea and the United States. *American Review of Public Administration*, 50(6–7), 590–597. <https://doi.org/10.1177/0275074020941720>

- 74 Park, Y., Choe, Y., Park, O., Park, S. Y., Kim, Y. M., Kim, J., Kweon, S., Woo, Y., Gwack, J., Kim, S. S., Hyun, J. L., Ryu, B., Sukjang, Y., Kim, H., Shin, S. H., Yi, S., Lee, S., Kim, H. K., Lee, H., ... Kyeongjeongm, E. (2020). Contact Tracing during Coronavirus Disease Outbreak, South Korea, 2020. *Emerging Infectious Diseases*, 26(10), 2465–2468. <https://doi.org/10.3201/EID2610.201315>
- 8 Parodi, S. M., & Liu, V. X. (2020). From Containment to Mitigation of COVID-19 in the US. *JAMA - Journal of the American Medical Association*, 323(15), 1441–1442. <https://doi.org/10.1001/jama.2020.3882>
- 82 Pham, L. (2001). *Theories of Democracy: A reader* (R. J. Terchek & T. C. Conte (eds.)). Lanham: Rowman and Littlefield.
- 49 Pinheiro, F., & Nelson, M. (1997). Re-Emergence of Dengue and Emergence of Dengue Haemorrhagic Fever in the Americas. *Dengue Bulletin*, 21, 1–6. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/148532>
- Qoroni, W., & Winarwati, I. (2021). Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia. *Journal Inicio Legis*, 2(1), 51–65.
- 139 Ramadani, R., & Rezah, F. S. (2021). Regional Head Election During COVID-19 Pandemic: the Antinomy in the Government Policies. *Yuridika*, 36(1), 213–234. <https://doi.org/10.20473/ydk.v36i1.23528>
- 8 Rochmyaningsih, D. (2020). Indonesia finally reports two coronavirus cases. Scientists worry it has many more. *ScienceMag.Org*. <https://doi.org/10.1126/science.abb5653>
- 112 Rosanti, R. (2020). Pandemic at the polls: How to prepare the elections post covid-19 (towards indonesia local elections in 2020). *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 147–167. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.181>
- Rusydi, A. A., & Sulchan, A. (2020). Simultaneous Regional Election Polemics in the Middle of the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Daulat Hukum*, 3(4), 369–375. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v3i4.12931>

- 27 Schmitter, P. C., & Karl, T. L. (1991). What Democracy Is. . . and Is Not. *Journal of Democracy*, 2(3), 75–88. <https://doi.org/10.1353/jod.1991.0033>
- Schwartz, B., & Schuman, H. (2005). History, commemoration, and belief: Abraham Lincoln in American memory, 1945-2001. *American Sociological Review*, 70(2), 183–203. <https://doi.org/10.1177/000312240507000201>
- 5 Sebayang, R. (2020, March). Efek tabligh akbar, kasus Covid-19 di Malaysia bertambah 190. *CNBC Indonesia*.
- 110 Shackleton, R. (1952). La genèse de “L’Esprit des Lois.” *Revue d’Histoire Littéraire de La France*, 52(4), 425–438.
- 80 Shi, H. J., Lee, J. B., Choi, M. K., Jang, Y. R., Cho, Y. K., & Eom, J. S. (2021). Protection and Response of a Tertiary Hospital in South Korea to the COVID-19 Outbreak. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, 15(1), e1–e5. <https://doi.org/10.1017/dmp.2020.199>
- 68 Shobahah, N. (2019). Piagam madinah dan konsep demokrasi modern islam masa klasik. *Ahkam Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 195–214. <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/ahkam.2019.7.1.195-214>
- 123 Simamora, R. H. (2017). A strengthening of role of health cadres in BTA-positive tuberculosis (TB) case invention through education with module development and video approaches in medan padang bulan community health center, North Sumatera Indonesia. *International Journal of Applied Engineering Research*, 12(20), 10026–10035. [https://www.semanticscholar.org/paper/A-Strengthening-of-Role-of-Health-Cadres-in-\(-TB-\)-Simamora/e7d03fb0fac43aba10a57212da1384e3490b2a29](https://www.semanticscholar.org/paper/A-Strengthening-of-Role-of-Health-Cadres-in-(-TB-)-Simamora/e7d03fb0fac43aba10a57212da1384e3490b2a29)
- 91 Simanjuntak, C. H., Larasati, W., Arjoso, S., Putri, M., Lesmana, M., Oyofa, B. A., Sukri, N., Nurdin, D., Kusumaningrum, R. P., Punjabi, N. H., Subekti, D., Djelantik, S., Sukarma, Sriwati, Muzahar, Lubis, A., Siregar, H., Mas’Ud, B., Abdi, M., ... Corwin, A. L. (2001). Cholera in Indonesia in 1993-1999. *American Journal of Tropical*

- Medicine and Hygiene*, 65(6), 788–797. <https://doi.org/10.4269/ajtmh.2001.65.788>
- 133 Sipe, N. G., & Dale, P. (2003). Challenges in using geographic information systems (GIS) to understand and control malaria in Indonesia. *Malaria Journal*, 2(36), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/1475-2875-2-36>
- 38 Siraj, F. M., & Nor, M. R. M. (2020). The Concept of Al-Jumhuriyah Wa Al-Ahkam in Political Philosophy of Ibn Rushd. *Religia Jurnal Ilmu Ilmu Keislaman*, 23(2), 236–250.
- 45 Skinner, Q. (1969). II. Thomas Hobbes and the Nature of the Early Royal Society. *The Historical Journal*, 12(2), 217–239. <https://doi.org/10.1017/S0018246X00004271>
- 28 Storm, L. (2008). An elemental definition of democracy and its advantages for comparing political regime types. *Democratization*, 15(2), 215–229. <https://doi.org/10.1080/13510340701846301>
- 84 Subandi, Y. (2017). Memahami Kabar Sejarah Dan Periode Demokrasi Di Indonesia. *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*, 2(1), 119. <https://doi.org/10.21111/dauliyah.v2i1.811>
- 64 Sugiono, B., & Husni, A. (2000). Supremasi Hukum dan Demokrasi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 7(14), 71–82. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss14.art5>
- 71 Suherman, A. (2019). Implementasi independensi hakim dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(1), 42–51.
- 35 Supardan, D. (2016). Sejarah dan Prospek Demokrasi. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 2(2), 125–135. <https://doi.org/10.15408/sd.v2i2.2811>
- Thalhah, H. (2009). Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(3), 413–422. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art6>



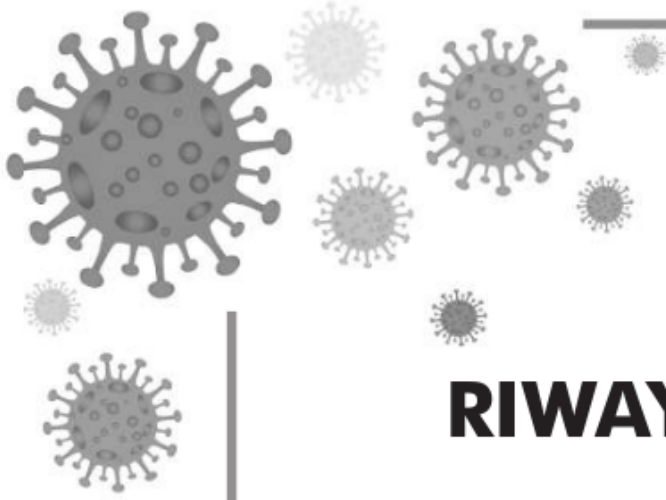
- Thejakartapost.com. (2020). Democracy in time of corona. *Opinion*.  
98  
<https://www.thejakartapost.com/academia/2020/05/20/democracy-in-time-of-corona.html>
- 73  
Tian, T., Zhang, J., Hu, L., Jiang, Y., Duan, C., Li, Z., Wang, X., & Zhang, H. (2021). Risk factors associated with mortality of COVID-19 in 3125 counties of the United States. *Infectious Diseases of Poverty*, 10(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s40249-020-00786-0>
- 5  
Vahdat, A., & Gambrell, J. (2020, March). Saudi officials ban pilgrimages to Mecca over COVID-19. *Times*.
- 47  
Viner, J. (1949). Bentham and J. S. Mill: The Utilitarian Background. *The American Economic Review*, 39(2), 360–382. <https://doi.org/10.1057/9780230226203.0037>
- Vinx, L. (2021). Hans Kelsen and the material constitution of democracy. *Jurisprudence*, 10(2), 142–171. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/20403313.2021.1921493>
- WHO. (2020). Syrian Arab Republic. *Definitions*, 02. <https://doi.org/10.32388/pzmfqv>
- 6  
Wijaya, D. N. (2014). John Locke Dalam Demokrasi. *Jurnal Sejarah Dan Budaya, Tahun Kede*, 13–24. <http://journal.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/article/view/4751>
- 6  
Wijaya, D. N. (2016). Jean-Jaques Rousseau dalam Demokrasi. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(1), 14. <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i1.9075>
- 5  
World Health Organization. (2020). *Practical considerations and recommendations for religious leaders and faith-based communities in the context of COVID-19* (Interim Guidance, Issue April).
- Yong, C. (2020, March). MOH identifying 95 Singaporeans at religious gathering in Malaysia after Covid-19 cases confirmed. *The Straits Times*.
- 31  
You, J. (2020). Lessons From South Korea's Covid-19 Policy Response. *American Review of Public Administration*, 50(6–7), 801–808. <https://doi.org/10.1177/0275074020943708>

Yee, J., Unger, L., Zadavec, F., Cariello, P., Seibert, A., Johnson, M. A., & Fuller, M. J. (2020). Novel coronavirus 2019 (COVID-19): Emergence and implications for emergency care. *Journal of the American College of Emergency Physicians Open*, 1(2), 63–69. <https://doi.org/10.1002/emp2.12034>

22

Zhang, D., Hu, M., & Ji, Q. (2020). Financial markets under the global pandemic of COVID-19. *Finance Research Letters*, April, 101528. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101528>

Szekely, L., Bozoky, B., Bendek, M., Ostad, M., Lavignasse, P., Haag, L., Wu, J., Jing, X., Gupta, S., Saccon, E., Sönnnerborg, A., Cao, Y., Björnstedt, M., & Szakos, A. (2021). Pulmonary stromal expansion and intra-alveolar coagulation are primary causes of COVID-19 death. *Heliyon*, 7(March), e07134. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07134>



# RIWAYAT PENULIS

## **PENULIS 1**

### **DATA PRIBADI**

Nama Lengkap : **Dr. Mohammad Hidayatullahman,  
M.I.Kom**

Tempat/ tgl lahir : **Sumenep, 15 Januari 1977**

Alamat : **Sumenep, Jawa Timur**

Telepon & WA : **0823 3292 0307**

Email : **hidayatullahman@wiraraja.ac.id**

Website : **www.mohammadhidayatullahman.  
com**

### **PENDIDIKAN**

1. **S3 Ilmu Sosial (Politik dan Pembangunan)  
Universitas Merdeka Malang, lulus 2020.**
2. **Magister Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo,  
Surabaya, lulus tahun 2012.**
3. **Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah  
Institut Agama Islam Al-Aqidah, Jakarta, lulus  
tahun 2002.**

## PUBLIKASI JURNAL

1. “Integrating Science and Religion at Malaysian and Indonesian Higher Education.” Terbit di *Jurnal Al-Ta’lim*, Volume 28, No. 1, 2021, (terakreditasi Nasional, Sinta 2).
2. “Religious Behavior of Indonesian Muslims as Responses to the Covid-19 Pandemic.” Terbit di *Jurnal Al Adabiya*, Volume 16, No. 1, Juni 2021, (terakreditasi Nasional, Sinta 4).
3. “Government Response and Community Participation Overcoming Outbreak and Managing Its Impact Covid-19.” Terbit di *Jurnal Ijtimaiyya*, Volume 13, No. 2, Desember 2020 (terakreditasi Nasional, Sinta 4).
4. “The roles of technology in al-Quran exegesis in Indonesia.” Terbit di *Technology and Society*, Volume 63, November 2020, (Scienccdirect, terindeks Internasional, Scopus Q1).
5. “Political investors: Political elite oligarchy and mastery of regional resources in Indonesia.” Terbit di *Asian Journal of Comparative Politics*, Volume Mei 2020 (terindeks Internasional, Scopus Q2).
6. “Relation of Religion, Economy and Politics: Islamization of Malay Community through Trade and Kingdom.” Terbit di *Jurnal Al-Tahrir*, Volume 20, No. 2, Juni 2020 (terakreditasi Nasional, Sinta 2).
7. “Why Development Failed? Facts and Analysis of Development Failure in Sumenep.” Terbit di *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 18, Nomor 1, Juni 2020 (terakreditasi Nasional, Sinta 3).
8. “Peran Wakil Rakyat Dalam Pembangunan di Daerah Pemilihan Sumenep.” Terbit di *Jurnal Sospol*, Volume 6, Nomor 1, April 2020 (terakreditasi Nasional, Sinta 3).
9. “COVID-19: Public support to handle economic challenges.” Terbit di *Jurnal Inovasi Ekonomi*, Volume 5, No. 2, Maret 2020 (terakreditasi Nasional, Sinta 4).
10. “The Role of Technology and Social Media in Spreading the Qur>an and Hadiths by Mubalig.” Terbit di *Jurnal DINIKA*, Volume 4, No. 1, Tahun 2019 (terakreditasi Nasional, Sinta 3).

11. "Kiai and Political Relations Reconciling Politics And Religion in Indonesia." Terbit di Jurnal Tahrir IAIN Ponorogo, Volume 18, No. 2, November 2018 (terakreditasi Nasional, Sinta 2).
12. "Analisis Curse Theory Pada Sumber Daya Alam Migas Bagi Warga Madura." Terbit di Jurnal Studi Agama dan Masyarakat. Volume 14, No. 1, tahun 2018 (terakreditasi Nasional, Sinta 3).
13. "Integration Of Islam and Local Culture: *Tandhe'* in Madura." Terbit di Jurnal Miqot, UIN Sumatera Utara, Vol. XLII No. 1 Januari-Juni 2018 (terakreditasi Nasional, Sinta 2).
14. "Corporate Social Responsibility Strategi Komunikasi Perusahaan Migas." Terbit di Jurnal Nomosleca Volume 3, No. 2, Oktober 2017 (terakreditasi Nasional).

#### **PUBLIKASI PROSIDING**

1. "The Strategies of Religious Leaders to Become Regional Heads in Indonesia," Proceedings of the 2nd International Conference on Islamic Studies, ICIS 2020, 27-28 October 2020, Ponorogo, Indonesia.
2. "The Role of Local People in Improving Education of the Archipelago and Remote Communities of Indonesia." Terbit di Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), Atlantis Press, Volume 267, Desember 2018 (terindeks Internasional, Thomson Reuters).
3. "Spice Route and Islamization on the West Coast of Sumatra in 17th-18th Century." Terbit di Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 302, Januari 2019, Atlantis Press (terindeks Internasional Thomson Reuters).
4. "Empowerment Salt Farmers to Alleviate Poverty." International Conferences Sdgs 2030 Challenges And Solutions, Pascasarjana Universitas Merdeka Malang, Agustus 2017, (terakreditasi Nasional).

### **PUBLIKASI BUKU**

1. Pengantar **Ekonomi Politik Pembangunan**, diterbitkan oleh Unitomo Press, Surabaya, Agustus 2021
2. **Perilaku Voters pada Masyarakat Multikultural**, diterbitkan oleh Edulitera, Malang, 2021.
3. **Kutukan Demokrasi**, diterbitkan oleh Edulitera Malang, 2021.
4. **Investor Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia**. Diterbitkan oleh Lembaga Kajian dan Studi Pembangunan (LKSP) Jakarta, 2020.
5. "Participation in building human resources: Independent strategies for facing demographic expansion in remote island." Terbit di CRC Press Taylor & Francis Group, Nopember 2020. (terindeks Internasional Scopus).
6. **Teori Sosial Empirik yang Sering Digunakan Untuk Penelitian Ilmiah; Skripsi, Tesis dan Disertasi**. Diterbitkan oleh Edulitera, Malang, 2019.
7. **Teori Sosial dan Pertentangannya**. Diterbitkan oleh Universitas Wiraraja Press, 2018.
8. **Media dan Pelayanan Publik**. Diterbitkan oleh LSPP Jakarta, 2014.

### **PUBLIKASI DI MEDIA**

1. "Kerikil Sepatu Kekuasaan," Terbit di [www.bermedia.id](http://www.bermedia.id), 12 April 2021.
2. "Responses by Islamic Mass Organizations and Ummah in Indonesia to Reduce the Number of Covid-19 Victims." Terbit di Asia Research Institute, September 2020.
3. "COVID-19 Tests Government Solidity and Middle Class Solidarity." Terbit di ISA Social Transformation and Sociology of Development, Edisi 09, Agustus 2020.
4. "Eid Al-Fitr and Religious Holidays: Challenges of Covid-19 in the Muslim World." terbit di The Sociological Review, edisi Solidarity and Care, 20 Mei 2020.

5. “Melawan Covid-19 Dengan Cinta.” Terbit di Harian Bhirawa, 5 April 2020.
6. “Tak Ada (Salahnya) Madura Provinsi.” Terbit di Majalah SULUH MADURA, edisi II Oktober 2016.
7. “UMKM Berjaringan Eksis di Era MEA.” Terbit di Majalah ASEAN, edisi 12 Juni 2016.
8. “Rekonsiliasi Pasca Pilkada.” Terbit di Majalah Parlemen, edisi Januari 2016.

## **SPEAKERS**

1. Pembicara pada acara «Literasi Digital Nasional» yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, pada Kamis, 10 Juni 2021, pukul 09.00-12.00 WIB secara daring, via zoom meeting. Judul materi “Mendeteksi Ancaman Keamanan Digital di Media Sosial.”
2. Pembicara pada Diskusi Publik dengan topik «Demokrasi Kita Mau Kemana?» yang digelar oleh Center for Indonesia Reform (CIR) bekerja sama dengan Data Sight pada tanggal 19 Juni 2021 secara daring via zoom. Judul Materi “Mengapa demokrasi mengutuk, dan bagaimana keluar dari kutukan demokrasi?”
3. Pembicara pada “Refleksi Indonesia Tahun 2020, Apakah Baik-Baik Saja?” Diselenggarakan oleh Center for Indonesian Reform (CIR), Sabtu, 26 Desember 2020.
4. Pembicara pada “Seminar Nasional Public Speaking.” Diselenggarakan oleh UKM Broadcasting Universitas Wiraraja, Sabtu, 26 Desember 2020.
5. Pembicara pada “Trans Integration on Lecture Series entitled, Ekonomi Islam Dalam Oligarki Politik, Mampukah Bertahan? Diselenggarakan oleh Fakultas Dakwah UIN STS Jambi, Rabu, 18 November 2020.
6. Pembicara pada “Pelatihan Menjadi Jurnalis.” Diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Pastoral IPI Malang, 29-30 Oktober 2020.

7. Pembicara pada “Bedah Buku Investor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.” Diselenggarakan oleh RANAH Institut, Padang, Sumatera Barat, 16 Oktober 2020.
8. Pembicara “Ngobrol Inspiratif, Diskursus Politik, Demokrasi Terancam Dikorupsi.” Diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Wiraraja, 12 September 2020.
9. Pembicara “Bedah Buku, Investor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.” Diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Pembangunan Daerah (LKPD), 5 September 2020.
10. Pembicara “Diskusi Buku, Investor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.” Diselenggarakan oleh Center for Indonesia Reform (CIR), 29 Agustus 2020.
11. Pembicara “Mimbar Virtual, Politik Dinasti Antara Etis dan atau Hak Politik?” Diselenggarakan oleh Barisan.co, 28 Juli 2020.
12. Pembicara “Bedah Buku, Negosiasi Ulang Indonesia.” Diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan FISIP Universitas Wiraraja, 16 Mei 2020.

## PRESENTERS

1. Presenter pada Konferensi Internasional Dakwah dan Komunikasi yang digelar oleh UIN Walisongo Semarang, pada tanggal 29 Juli 2021 secara daring, via zoom meeting. Materi presentasi dengan judul «Failure of State Communication in Countering Terrorism to Muslim and Islamic Mass Organizations».
2. Presenter pada International Conference on Humanities and Social Sciences 2021 (ICHSoS) diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Malang yang digelar secara daring, pada tanggal 18-19 Juni 2021. Judul artikel yang dipresentasikan «Covid 19 and Medical Personnel in Social Choice Theory.»
3. Presenter pada “1st International Conference on Innovation in Science, Health and Technology (ICISHT), Clientelism Politics People’s Representative.” Diselenggarakan oleh Universitas Negeri Gorontalo, 10-11 Desember 2020.



4. Presenter pada “Conference and Workshop, The Pandemic in Indonesia and the World: Reflections and the Way Forward.” Diselenggarakan oleh Pascasarjana UIN STS Jambi Indonesia, pada 18-19 Desember 2020.
5. Presenter pada “The 3rd International Symposium on Religious Life (ISRL), Religious Life, Ethics and Human Dignity in the Disruptive Era.” Diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), pada 2-5 Desember 2020.
6. Presenter pada “The 2020 Annual Conference Indonesian Association for Public Administration. Strengthening Governance Capacity and Public Administration Amidst Pandemic and New Normal Era.” Diselenggarakan oleh IAPA, 11 November 2020.
7. Presenter pada International Conference on Islam and Muslim Societies (ICONIS) 2019, Magister Program State of Islamic Studies (IAIN) Salatiga, Central Java, 6-7 August, 2019, by the title “Political Investors: Political Elit Oligarchy and Mastery of Regional Resources.”
8. Presenter pada International Conference on Indonesian Social and Political Enquiries 2018, FISIP Universitas Diponegoro, Semarang, 22-23 Oktober 2018.
9. Presenter pada 5th Asia-Pacific Education Conference (AECON 2018), Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 13-14 Oktober 2018.
10. Presenter pada “The 1st International Conference on Islamic Studies (ICIS).” Diselenggarakan oleh Jurnal Al-Tahrir di IAIN Ponorogo, 10-12 Oktober 2018.
11. Presenter pada “Indonesia Development Forum 2018, Potensi Ekonomi dan Tantangan Pembangunan Jejaring Transportasi (Studi Wilayah Kepulauan Sumenep, Jawa Timur).” Diselenggarakan oleh Bappenas RI, di Jakarta 10-11 Juli 2018.
12. Presenter “Seminar Nasional, Perkembangan Terkini, Teori, Riset dan Praktik Administrasi Publik.” Diselenggarakan oleh FISIP Universitas Negeri Jember, 14-15 Februari 2018.

13. Presenter pada “International Islamic Research Forum (IIRF).” Diselenggarakan oleh IAIN Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada 27-28 November 2017.
14. Presenter pada “Seminar Internasional Studi Islam, Islam a Friendly Cultural Religion.” Diselenggarakan oleh IAIN Pamekasan, Jawa Timur, pada 21-22 Oktober 2017.
15. Presenter pada “International Conference on Sustainable Development Goals (2030): Challenges and Solutions.” Diselenggarakan oleh Pascasarjana Universitas Merdeka Malang, pada 11-12 Agustus 2017.

### **REVIEWER**

1. Jurnal E-Saintika, Undikma, Nusa Tenggara Barat, 2021-sekarang.
2. Environment, Development and Sustainability (ENVI) Journal, Scopus Q3, 2019-2020.
3. Jurnal Public Corner, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, 2018-sekarang.
4. Journal of Governance Innovation, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Raden Rahmat Malang, April 2019-sekarang.
5. Journal of Community Service and Empowerment, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020-sekarang.
6. Tabuah, Rumah Jurnal Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, 2020-sekarang.

### **PENGALAMAN PEKERJAAN**

1. Dosen FISIP Universitas Wiraraja Sumenep, Maret 2015-sekarang. (Mata kuliah yang diampu; Ekonomi Politik Pembangunan; Teori dan Isu Pembangunan; Administrasi Pembangunan; Politik Lokal).
2. Kontributor Metro TV wilayah Madura, Mei 2011-sekarang.
3. Produser televisi lokal Madura Channel, Maret 2008-Maret 2011.

### **PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Direktur Center for Indonesian Reform (CIR), Desember 2020-sekarang
2. Penasihat Komunitas Jurnalis Sumenep (KJS) 2014-sekarang
3. Ketua Paguyuban Jurnalis Merah Putih (JMP) Kabupaten Sumenep 2011-2013
4. Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumenep 2013-2014.

### **PENGALAMAN TUGAS**

1. Pembina Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Universitas Wiraraja 2015-2020.
2. Tim seleksi (Perwakilan Kementerian Kominfo di daerah) Komisi Informasi Kabupaten Sumenep periode 2017-2021. Februari-Juli 2017.
3. Juri Anugerah Jurnalistik Migas (AJM) KEI-SKK Migas, 2016.

### **AWARD**

1. Wisudaran terbaik, IPK 3,94, lulusan Februari 2020, program Doktor Ilmu Sosial Universitas Merdeka Malang.
2. Best paper pada Indonesia Development Forum 2018 dengan topik "Potensi Ekonomi dan Tantangan Pembangunan Jejaring Transportasi (Studi Wilayah Kepulauan Sumenep, Jawa Timur), Bappenas, di Jakarta 10-11 Juli 2018.
3. Best Paper pada International Islamic Research Forum (IIRF) IAIN Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 27-28 November 2017.
4. Pemenang ketiga, Lomba Menulis Majalah Swa tentang CSR, tahun 2007

## **PENULIS 2**

### **DATA PRIBADI**

Nama : **Dr. Ita Rahmania Kusumawati, S.S., S.Si., M.A.**  
Tempat Lahir : Jombang, 11 Mei 1981  
Alamat : Jombang Jawa Timur  
Telepon & WA : 0813 9295 3671  
Email : ita.jombang@yahoo.com

### **PENDIDIKAN**

1. S3 Studi Agama dan Lintas Budaya, Universitas Gadjah Mada, lulus tahun 2017.
2. S2 Studi Agama dan Lintas Budaya, Universitas Gadjah Mada, lulus tahun 2009.
3. S1 Sastra Asia Barat (Sastra Arab), Universitas Gadjah Mada, lulus tahun 2005.
4. S1 Statistika, Universitas Islam Indonesia, lulus tahun 2005.

### **PUBLIKASI JURNAL**

1. *"Integrating Science and religion at Malaysian Indonesian Higher Education."* Terbit di Jurnal Al-Ta'lim, vol 28, no. 1, 2021 (terakreditasi nasional di Sinta 2).s
2. *"Religious Behaviour of Indonesian Muslims Responses to the Covid-19 Pandemic."* Terbit di Jurnal Al-Adabiya, vol. 16, no. 1, Juni 2021 (terakreditasi nasional di Sinta 4).
3. *"Qari' Ethnography: the Implementation of Mudarasaḥ Qira`at al-Qur`an in the Recitation Community of Qira`at Asyar Janggalan Kudus"*, National Scientific Forum Proceeding on Donation of Thought of Graduate School based on Multicultural & Local Wisdom as the Foundation of National Independence and Sovereignty, Graduate School, Gadjah Mada University, 2016. ISBN: 978-602-8683-07-4.

4. "Growth and Development of Sanad Qira'at and Thariq Qira'at in Indonesia" published in *Finiqas: Journal of Islamic Sciences and Humanities*, No. 2 Vol. 4, 2015. ISSN: 2303-3088.
5. "Khasha'ish al-Nuwuwwi wa Tanmiyatu Ta'limi al-Maharat al-Lughawiyah Laday al-Athfal" published in *Al-Tadris: Dauriyyaatu Tadriisi al-Lughati al-Arabiyyati*, No. 2 Vol. 2, 2014. ISSN: 2303-2871.
6. "Istikhdamu Bithaqati al-Takmilati fi Ta'limi Maharat al-Qira'ati bi al-Thathbiqi 'ala Thalabati Jami'ati Hasyim Asy'ari" published in *Al-Tadris: Dauriyyaatu Tadriisi al-Lughati al-Arabiyyati*, No. 1 Vol. 1, 2013. ISSN: 2303-2871.

### **PEMBICARA**

1. Talkshow and Dialog Perbandingan Hukum Keluarga antar Agama di Pascasarjana Universitas Hasyim Asy'ari, 13 Desember 2020, dengan judul Perpaduan Antara Hukum Agama dengan Hukum Adat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Pengembangan Program Perkuliahan Perbandingan Hukum Keluarga antar Agama, di Pascasarjana Universitas Hasyim Asy'ari, 16 & 24 November 2019, dengan judul Akomodasi Budaya Lokal dalam Legislasi Hukum Keluarga di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
3. Pengembangan Program Perkuliahan Perbandingan Hukum Keluarga antar Agama, di Pascasarjana Universitas Hasyim Asy'ari, 12 Desember 2018, dengan judul Perkawinan Sekufu dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.
4. Kuliah Umum Perbandingan Hukum Keluarga Antar Agama, di Pascasarjana Universitas Hasyim Asy'ari, 25 Nov 2017, dengan judul Hukum Keluarga Islam dalam Potret Interrelasi Sosial.

### **PRESENTER**

1. Forum Komunikasi Dosen Peneliti (FKDP) dalam Penyusunan Laporan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Menjadi Artikel Ilmiah di Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro, 28-29

- Okt 2018, dengan judul Pola Pemahaman terhadap Hukum Keluarga dalam Iman Islam, Katolik, dan Budha.
2. Konferensi Internasional Studi Islam Interdisipliner, Ilmu Sosial, dan Humaniora (ICIIS-SSH), Sekolah Pascasarjana Institut Islam Negeri Tulung Agung, 16-17 Juli 2018, dengan judul *The Transformation of The Kendurenan Tradition in Javanese Society*.
  3. Forum Ilmiah Nasional Sumbangan Pemikiran Sekolah Pascasarjana Berbasis Multikultural & Kearifan Lokal sebagai Yayasan Kemandirian dan Kedaulatan Nasional di Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, dengan judul "Etnografi Qari>: Implementasi *Mudarasah Qira`at al-Qur`an* pada Komunitas Pengajian Qira`at Asyar Janggalan Kudus."

### **PENGALAMAN BEKERJA**

1. Dosen FAI & Program Pascasarjana Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, 2005-sekarang.
2. Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018-sekarang.
3. Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2012-sekarang.
4. Dosen Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2013-2018.
5. Dosen Bahasa Arab untuk Prodi Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2012-2017.
6. Instruktur Program Pelatihan Kewirausahaan di Campus Entrepreneur Program Pascasarjana UGM, 2008-2009.
7. Divisi Pendidikan dan Pelatihan di Holding BMT Amratani, 2006-2007.
8. Guru di MA AL-Urwatul Wutsqa Diwek Jombang, 2005-2006.

### **PENGALAMAN BERORGANISASI**

1. Wakil Sekretaris Jendral di DPP Forum Silaturahmi Doktor Indonesia, 2021-sekarang.

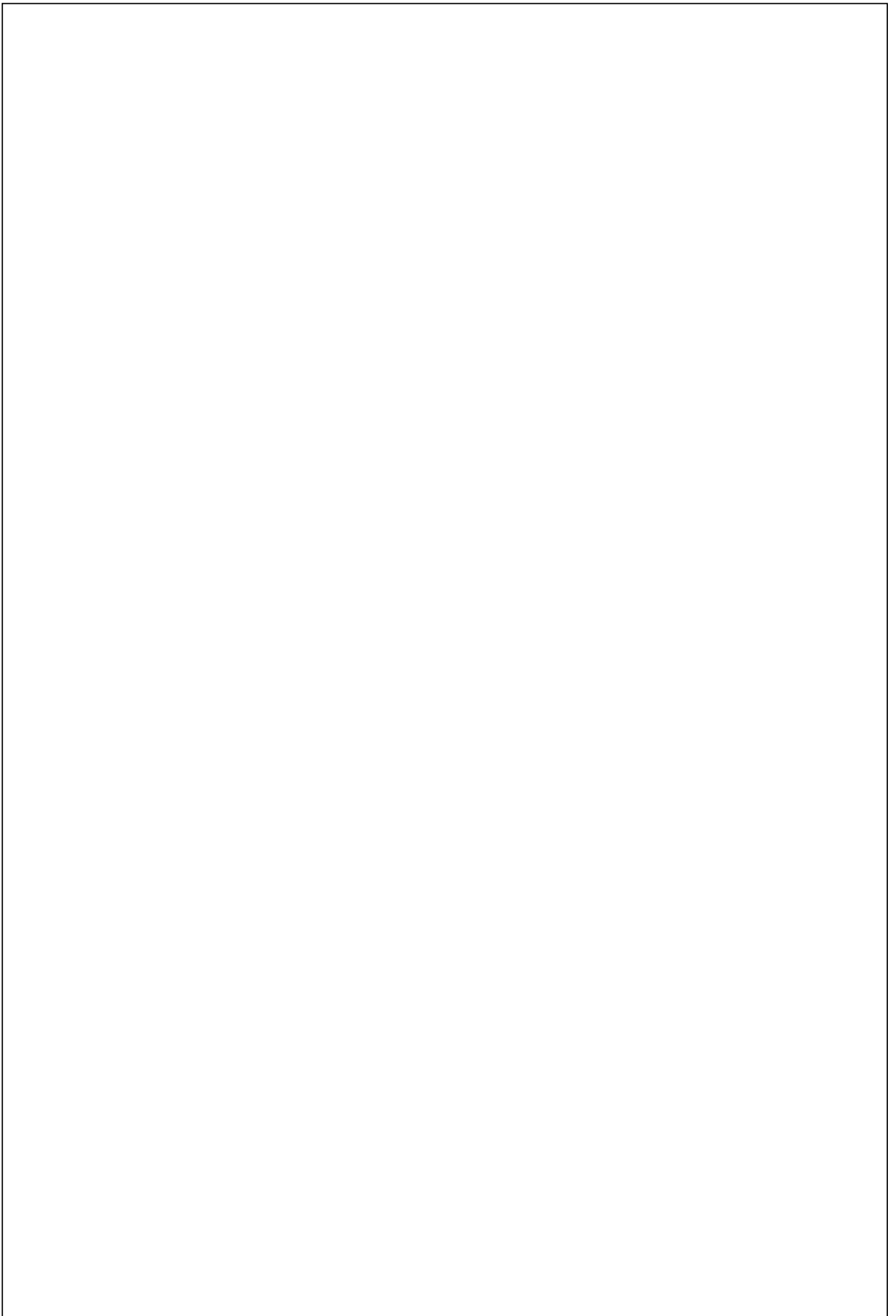
2. Dewan Pembina tingkat wilayah di Komunitas Seni Nusantara Rahyang Niskala Sunda, 2021-sekarang.
3. Anggota Forum Komunikasi Dosen Peneliti PTKIS Jawa Timur, 2018-sekarang.
4. Anggota Ikatan Mudarris & Mudarisah Lughah Arabiyah (IMLA), 2017-sekarang
5. Sekretaris Divisi Kajian Kewirausahaan Sosial di INA FRONTIER, 2009-2012.
6. Sekretaris Divisi Komunikasi dan Kerjasama Keluarga Alumni Pascasarjana (KAPASGAMA) UGM, 2008-2009.
7. Sekretaris Divisi Pengembangan Kewirausahaan Himpunan Mahasiswa Pascasarjana (HIMPAS) UGM, 2001-2008.

#### **PENGALAMAN BERTUGAS**

1. Ketua Gugus Penjaminan Mutu Program Pascasarjana Universitas Hasyim Asy'ari, 2017-2021.
2. Deklarator Bersama untuk Pendirian Forum Komunikasi Dosen Peneliti PTKIS Jawa Timur, 2018.

*- Ita Rahmania Kusumawati -*







## NEGARA DEMOKRASI

Menghadapi

# Pandemi Covid-19

Negara-negara demokrasi memiliki tantangan tersendiri dalam menghadapi pandemi covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Amerika Serikat tidak mampu menjawab tantangan ini dengan baik. Keduanya lambat dalam menanggapi situasi hingga kritis. Sementara itu, negara demokrasi lain seperti Korea Selatan mampu menangani pandemi dengan cepat dan berhasil menahan penyebarannya. Demokrasi dengan kepemimpinan yang solid dan responsif serta integrasi antara lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, persatuan sejarah dan budaya nasional, peraturan perundang-undangan negara, dan anggaran negara untuk menangani wabah dan dukungan partisipasi masyarakat dapat mengatasi covid-19. Kombinasi ini menjadi kunci sukses, seperti yang terjadi di Korea Selatan. Sebaliknya, demokrasi dengan kepemimpinan yang lemah dan tidak responsif, serta kurangnya integrasi dalam penerapan faktor-faktor tersebut di atas, bisa menjadi penyebab kegagalan penanganan pandemi covid-19 seperti di dua negara lainnya, Indonesia dan Amerika Serikat.



**Edulitera**

Jl. Apel No. 28 A Semanding, Sumbersekar,  
Dau, Kab. Malang (65151)  
Telp./Fax: (0341) 5033268  
Email: eduliteramalang@gmail.com

ISBN: 978-623-6146-80-4



9 786236 146804

# Negara Demokrasi Menghadapi Pandemi Covid-19: Indonesia, Amerika Serikat dan Korea Selatan

## ORIGINALITY REPORT

**23%**  
SIMILARITY INDEX

**17%**  
INTERNET SOURCES

**5%**  
PUBLICATIONS

**16%**  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>Submitted to Universitas Wiraraja</b> Student Paper	<b>7%</b>
<b>2</b>	<b>"Jean-Jaques Rousseau dalam Demokrasi", 'Universitas Negeri Semarang'</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>3</b>	<b>repository.um-surabaya.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>dspace.uc.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>5</b>	<b>ejournal.insuriponorogo.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>6</b>	<b>digilib.uin-suka.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>7</b>	<b>Submitted to Columbia University</b> Student Paper	<b>&lt;1%</b>
<b>8</b>	<b>raiith.iith.ac.in</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>9</b>	<b>ejournal.upi.edu</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>10</b>	<b>globalresilience.northeastern.edu</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>11</b>	<b>Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur</b> Student Paper	<b>&lt;1%</b>
<b>12</b>	<b>lppm.ibrahimy.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>

---

13	<a href="https://repository.unpas.ac.id">repository.unpas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="https://samafind.sama.gov.sa">samafind.sama.gov.sa</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://www.batamnews.co.id">www.batamnews.co.id</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://jurnal.umsb.ac.id">jurnal.umsb.ac.id</a> Internet Source	<1 %
17	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
18	<a href="https://repository.upi.edu">repository.upi.edu</a> Internet Source	<1 %
19	Submitted to University of New England Student Paper	<1 %
20	<a href="http://kgsc.wordpress.com">kgsc.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="https://transformative.ub.ac.id">transformative.ub.ac.id</a> Internet Source	<1 %
22	<a href="http://www.nrso.ntua.gr">www.nrso.ntua.gr</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://hrmars.com">hrmars.com</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://journal.unpar.ac.id">journal.unpar.ac.id</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="https://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="https://dspace.hangtuah.ac.id:8080">dspace.hangtuah.ac.id:8080</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="https://revistas.udc.gal">revistas.udc.gal</a> Internet Source	<1 %

---

28	<a href="http://giapjournals.com">giapjournals.com</a> Internet Source	<1 %
29	Submitted to Sogang University Student Paper	<1 %
30	Submitted to University College London Student Paper	<1 %
31	<a href="http://happiness-report.s3.amazonaws.com">happiness-report.s3.amazonaws.com</a> Internet Source	<1 %
32	Submitted to University of Essex Student Paper	<1 %
33	<a href="http://Www.Medrxiv.Org">Www.Medrxiv.Org</a> Internet Source	<1 %
34	<a href="http://jmi.ipusk.lipi.go.id">jmi.ipusk.lipi.go.id</a> Internet Source	<1 %
35	<a href="http://ojs.unida.ac.id">ojs.unida.ac.id</a> Internet Source	<1 %
36	<a href="http://Repositorium.uminho.pt">Repositorium.uminho.pt</a> Internet Source	<1 %
37	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1 %
38	<a href="http://umexpert.um.edu.my">umexpert.um.edu.my</a> Internet Source	<1 %
39	<a href="http://www.slideshare.net">www.slideshare.net</a> Internet Source	<1 %
40	Submitted to University of Birmingham Student Paper	<1 %
41	<a href="http://data-scindeks.ceon.rs">data-scindeks.ceon.rs</a> Internet Source	<1 %
42	<a href="http://digilib.uns.ac.id">digilib.uns.ac.id</a> Internet Source	<1 %

43	<a href="http://mita-tembem.blogspot.com">mita-tembem.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
44	<a href="http://nakhoda.ejournal.unri.ac.id">nakhoda.ejournal.unri.ac.id</a> Internet Source	<1 %
45	<a href="http://openscientist.pubpub.org">openscientist.pubpub.org</a> Internet Source	<1 %
46	Submitted to University of Technology, Sydney Student Paper	<1 %
47	Submitted to University of Sussex Student Paper	<1 %
48	<a href="http://foitbesa.wordpress.com">foitbesa.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
49	<a href="http://docplayer.net">docplayer.net</a> Internet Source	<1 %
50	<a href="http://feganet.blogspot.com">feganet.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
51	<a href="http://jom.fikom.budiluhur.ac.id">jom.fikom.budiluhur.ac.id</a> Internet Source	<1 %
52	<a href="http://jurnal.amikom.ac.id">jurnal.amikom.ac.id</a> Internet Source	<1 %
53	<a href="http://wahdahamaliatuzzahraassyifa.blogspot.com">wahdahamaliatuzzahraassyifa.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
54	<a href="http://www.magonlinelibrary.com">www.magonlinelibrary.com</a> Internet Source	<1 %
55	<a href="http://www.voaindonesia.com">www.voaindonesia.com</a> Internet Source	<1 %
56	Submitted to Radboud University Student Paper	<1 %
57	Submitted to University of Cambridge Student Paper	<1 %

58	<a href="https://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
59	<a href="http://www.berghahnjournals.com">www.berghahnjournals.com</a> Internet Source	<1 %
60	<a href="http://www.bircu-journal.com">www.bircu-journal.com</a> Internet Source	<1 %
61	<a href="http://www.liputan6.com">www.liputan6.com</a> Internet Source	<1 %
62	<a href="http://www.springerprofessional.de">www.springerprofessional.de</a> Internet Source	<1 %
63	<a href="http://book.fisip.uns.ac.id">book.fisip.uns.ac.id</a> Internet Source	<1 %
64	<a href="http://pasca-umi.ac.id">pasca-umi.ac.id</a> Internet Source	<1 %
65	<a href="http://portal.helcom.fi">portal.helcom.fi</a> Internet Source	<1 %
66	<a href="http://www.fkm.ui.ac.id">www.fkm.ui.ac.id</a> Internet Source	<1 %
67	Submitted to Goldsmiths' College Student Paper	<1 %
68	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1 %
69	Submitted to University of Warwick Student Paper	<1 %
70	<a href="http://cszoel.wordpress.com">cszoel.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
71	<a href="http://jurnal.penerbitsign.com">jurnal.penerbitsign.com</a> Internet Source	<1 %
72	<a href="http://wahyuyeee.blogspot.com">wahyuyeee.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %

73 Mario Coccia. "High health expenditures and low exposure of population to air pollution as critical factors that can reduce fatality rate in COVID-19 pandemic crisis: a global analysis", *Environmental Research*, 2021  
Publication <1 %

---

74 Muhammad Hafizh, Yousif Badri, Sakib Mahmud, Amir Hafez, Pilsung Choe. "COVID-19 vaccine willingness and hesitancy among residents in Qatar: a quantitative analysis based on machine learning", *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 2021  
Publication <1 %

---

75 Submitted to University of Wales Swansea  
Student Paper <1 %

---

76 [constitution.hi.is](http://constitution.hi.is)  
Internet Source <1 %

---

77 [propionagreat.wordpress.com](http://propionagreat.wordpress.com)  
Internet Source <1 %

---

78 [qdoc.tips](http://qdoc.tips)  
Internet Source <1 %

---

79 [www.ejournal-binainsani.ac.id](http://www.ejournal-binainsani.ac.id)  
Internet Source <1 %

---

80 [www.frontiersin.org](http://www.frontiersin.org)  
Internet Source <1 %

---

81 Tathagata Chatterji, Souvanic Roy, Atanu Chatterjee. "Global contagion and local response: the influence of centre–state relations and political culture in pandemic governance", *Asia Pacific Journal of Public Administration*, 2021  
Publication <1 %

---

82 Submitted to University of Melbourne



<1 %

83

Submitted to University of Sydney

Student Paper

<1 %

84

[ejournal.unida.gontor.ac.id](http://ejournal.unida.gontor.ac.id)

Internet Source

<1 %

85

[eprints.machung.ac.id](http://eprints.machung.ac.id)

Internet Source

<1 %

86

[penjas.unsil.ac.id](http://penjas.unsil.ac.id)

Internet Source

<1 %

87

[pubcovid19.pt](http://pubcovid19.pt)

Internet Source

<1 %

88

[tirto.id](http://tirto.id)

Internet Source

<1 %

89

[www.modul.ac.at](http://www.modul.ac.at)

Internet Source

<1 %

90

Submitted to Macquarie University

Student Paper

<1 %

91

Submitted to Seaview High School

Student Paper

<1 %

92

Submitted to The London College UCK

Student Paper

<1 %

93

[dspace.ut.ee](http://dspace.ut.ee)

Internet Source

<1 %

94

[ecampus.imds.ac.id](http://ecampus.imds.ac.id)

Internet Source

<1 %

95

[id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org)

Internet Source

<1 %

96

[www.dhs.gov](http://www.dhs.gov)

Internet Source

<1 %

97

[www.kompas.com](http://www.kompas.com)

Internet Source

<1 %

98

[www.thejakartapost.com](http://www.thejakartapost.com)

Internet Source

<1 %

99

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

<1 %

100

Submitted to University of Malaya

Student Paper

<1 %

101

[contoh-contohskripsi.blogspot.com](http://contoh-contohskripsi.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

102

[pontianakpost.jawapos.com](http://pontianakpost.jawapos.com)

Internet Source

<1 %

103

[www.annualreviews.org](http://www.annualreviews.org)

Internet Source

<1 %

104

[www.cambridge.org](http://www.cambridge.org)

Internet Source

<1 %

105

Submitted to University of California, Los Angeles

Student Paper

<1 %

106

Submitted to University of Sheffield

Student Paper

<1 %

107

[assets.researchsquare.com](http://assets.researchsquare.com)

Internet Source

<1 %

108

[dergipark.org.tr](http://dergipark.org.tr)

Internet Source

<1 %

109

[e-journal.unair.ac.id](http://e-journal.unair.ac.id)

Internet Source

<1 %

110

[ebin.pub](http://ebin.pub)

Internet Source

<1 %

111

[ir-library.ku.ac.ke](http://ir-library.ku.ac.ke)

Internet Source

<1 %

112	<a href="http://journal.uinsgd.ac.id">journal.uinsgd.ac.id</a> Internet Source	<1 %
113	<a href="http://link.springer.com">link.springer.com</a> Internet Source	<1 %
114	<a href="http://news.uci.edu">news.uci.edu</a> Internet Source	<1 %
115	<a href="http://repositorio.iscte-iul.pt">repositorio.iscte-iul.pt</a> Internet Source	<1 %
116	<a href="http://www.ejecs.org">www.ejecs.org</a> Internet Source	<1 %
117	Aritra Ghosh, Srijita Nundy, Sumedha Ghosh, Tapas K. Mallick. "Study of COVID-19 pandemic in London (UK) from urban context", <i>Cities</i> , 2020 Publication	<1 %
118	Submitted to Colorado Technical University Student Paper	<1 %
119	<a href="http://cfile201.uf.daum.net">cfile201.uf.daum.net</a> Internet Source	<1 %
120	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
121	<a href="http://jurnal.uinbanten.ac.id">jurnal.uinbanten.ac.id</a> Internet Source	<1 %
122	<a href="http://mrsvplusthree.blogspot.com">mrsvplusthree.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
123	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
124	<a href="http://repository.iainpalopo.ac.id">repository.iainpalopo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
125	<a href="http://www.iiste.org">www.iiste.org</a> Internet Source	<1 %

126	Submitted to Liberty University Student Paper	<1 %
127	Repository.Umsu.Ac.Id Internet Source	<1 %
128	Scholarworks.iupui.edu Internet Source	<1 %
129	apps.mediaindonesia.com Internet Source	<1 %
130	ejournal.iainkerinci.ac.id Internet Source	<1 %
131	ejournal.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1 %
132	ekon.go.id Internet Source	<1 %
133	eprints.qut.edu.au Internet Source	<1 %
134	insanpendidikan21.blogspot.com Internet Source	<1 %
135	journal.ipts.ac.id Internet Source	<1 %
136	medium.com Internet Source	<1 %
137	nsuworks.nova.edu Internet Source	<1 %
138	portal.kominfo.go.id Internet Source	<1 %
139	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude bibliography  On